DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH
RAPAT KERJA KOMISI IX DPR RI
DENGAN MENTERI KETENAGAKERJAAN RI DAN KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI (BNSP)

Tahun Sidang	:	2024-2025
Masa Persidangan	:	IV
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari & Tanggal Rapat	:	Rabu, 2 Juli 2025
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi IX DPR RI
Acara	:	1. Evaluasi kebutuhan infrastruktur dan instruktur pelatihan Balai Besar Latihan Kerja di setiap provinsi untuk meningkatkan kompetensi dan menghasilkan tenaga kerja yang andal dan berdaya saing; 2. Percepatan sertifikasi kompetensi untuk tenaga kerja oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Waktu	:	Pukul 14.26 s.d. 16.57 WIB
Ketua Rapat	:	Charles Honoris (Wakil Ketua Komisi IX DPR RI/F-PDI PERJUANGAN)
Sekretaris Rapat	:	Ida Nuryati, S.Sos, M.A (Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI)
Hadir	:	**A. PIMPINAN DAN ANGGOTA:** 26 orang Anggota hadir dari 43 orang Anggota dengan rincian sebagai berikut:

I. PIMPINAN:

1. Felly Estelita Runtuwene, S.E (Ketua Komisi IX DPR RI/ F-P. NASDEM)
2. Charles Honoris (Wakil Ketua Komisi IX DPR RI/ F-PDI PERJUANGAN)
3. drg. Putih Sari (Wakil Ketua Komisi IX DPR RI/ F-P. GERINDRA)

II. ANGGOTA:

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (F-PDI PERJUANGAN)

5 orang Anggota dari 7 Anggota

1. Dr. H. Edy Wuryanto, S.KP.,M.Kep
2. Sukur H. Nababan, S.T.
3. Dr. Sihar P.H. Sitorus, BSBA., M.B.A.
4. Eko Kurnia Ningsih
5. H. Ahmad Safei, S.H., M.H

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (F-P. GOLKAR)

3 orang Anggota dari 7 Anggota

1. Ranny Fahd Arafiq
2. Teti Rohatiningsih, S.Sos.
3. H. Tubagus Haerul Jaman, S.E.

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (F-P. GERINDRA)

2 orang Anggota dari 5 Anggota

1. Ir. Sri Meliyana
2. Ir. H. Nuroji

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-P. NASDEM)

3 orang Anggota dari 4 Anggota

1. Rahmawati Herdian, S.H., M.Kn.
2. Nafa Urbach
3. Nurhadi, S.Pd., M.H.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

3 orang Anggota dari 4 Anggota

1. Zainul Munasichin
2. Asep Romy Romaya
3. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, S.Th.I., M.M.

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)

3 orang Anggota dari 4 Anggota

1. Dr. Hj. Netty Prasetiyani, M.Si
2. drh. H. Achmad Ru'yat, M.Si
3. Dr. H. Muh. Haris, S.S,., M.Si.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
(F-PAN)
1 orang Anggota dari 4 Anggota
1. Ir. H. Sahidin

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
(F-P. DEMOKRAT)
3 orang Anggota dari 3 Anggota
1. dr. Hj. Cellica Nurrachadiana
2. Dra. Lucy Kurniasari
3. Tutik Kusuma Wardhani, S.E., M.M., M.Kes.

B. PEMERINTAH/UNDANGAN
1. Menteri Ketenagakerjaan RI (Prof. Yassierli, S.T., M.T., Ph.D.) beserta jajaran.
2. Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Syamsi Hari, S.E., M.M) beserta jajaran.

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (CHARLES HONORIS/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Baik, kita mulai.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua*,*
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.

Yang kami hormati Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI,
Bapak Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia beserta Jajaran,
Yang kami hormati Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi beserta Jajaran, serta
Hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf, Pak Menteri dan Bapak-bapak yang hadir di sini. Rapat kita agak terlambat satu jam lebih, ya, karena rapat sebelumnya mundur, Pak, molor, Pak, waktunya. Jadi, mohon maaf kita baru, belum lama selesai rapat, baru kita langsung kita mulai.

Bapak/Ibu, sebelum rapat ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa kita mulai.

(BERDOA)

Selesai.

Berdasarkan data dari Sekretariat, hari ini Anggota Komisi IX DPR RI yang telah hadir berjumlah 25 orang dari 43 Anggota sehingga sesuai dengan Tata Tertib DPR RI, rapat sudah bisa kita nyatakan kuorum dan kita nyatakan terbuka.

Apakah bisa disetujui, Bapak/Ibu? Setuju, ya.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.26 WIB)

Baik, untuk mengenai waktu rapat, saat ini sudah pukul 14.26, 14.30, ya. Apabila bisa disepakati, kita tetapkan dulu sampai jam 16.00, apabila memang dibutuhkan nanti kita perpanjang kembali.

Setuju, Bapak/Ibu? Ya.

(RAPAT: SETUJU)

Agenda rapat hari ini adalah, yang pertama, evaluasi kebutuhan infrastruktur dan instruktur pelatihan Balai Besar Latihan Kerja di setiap provinsi untuk meningkatkan kompetensi dan menghasilkan tenaga kerja yang andal dan berdaya saing. Yang kedua, percepatan sertifikasi kompetensi profesi untuk tenaga kerja oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Sebelum mendengarkan paparan, kita sepakati dahulu bahwa paparan kurang lebih selama 10-15 menit.

Setuju, Bapak/Ibu?

(RAPAT: SETUJU)

Baik, kami persilakan terlebih dahulu Bapak Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk bisa menyampaikan paparan dan setelah itu disusul oleh Bapak Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Ya, silakan, Bapak Menteri.

MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Prof. YASSIERLI, S.T., M.T., Ph.D.):

Baik, terima kasih.

Bapak dan Ibu yang saya hormati.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Terima kasih, Pimpinan.

Yang kami hormati Pimpinan Komisi IX DPR RI, hadir Pak Charles, Bu Putih, Bapak dan Ibu Anggota Komisi IX, dan Teman-teman semua.

Mohon izin, hadir bersama kami di sini ada dari Kementerian Ketenagakerjaan, ada Pak Sekjen, eh, ada Pak Wamen, kemudian ada Pak Sekjen, kemudian ada JPT Madya, dibantu oleh JPT Pratama, kemudian teman-teman dari BNSP.

Tadi 10 menitnya masing-masing, ya, Pak Ketua? Masing-masing 10 menit, ya, 10-15 menit, masing-masing, ya. Baik, mohon izin *slide*-nya.

Pertama sekali, terima kasih sekali lagi, apa, berkenan mengundang kami ke sini dan saya melihat memang topik yang diangkat pada siang hari ini sangat relevan dengan kondisi kita dan tuntutan dan tantangan kita ke depan. *Slide*.

Saya mulai dengan kerangka amanah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Memang kalau kita lihat, salah satu aspek terkait tentang pembangunan SDM unggul, kita memiliki visi Indonesia Emas 2045, maka kemudian aspek ketenagakerjaan itu menjadi sangat relevan dan di salah satu pasal di Undang-Undang Nomor 13 tersebut, berbicara tentang pelatihan kerja.

Pelatihan kerja sebagai hak pekerja dan kewajiban negara, dan pelatihan kerja itu kemudian kita rancang untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas, dan kita harus membangun suatu sistem yang mampu melibatkan juga dunia usaha dan dunia industri dalam suatu ekosistem pelatihan kerja sehingga kita berharap hasilnya itu bisa memberikan *impact* untuk peningkatan kompetensi dan produktivitas tadi. *Next*.

Amanah Perpres Nomor 68 Tahun 2022 memang berbicara tentang bagaimana kita bisa melakukan revitalisasi pelatihan vokasi. Jadi, Bapak dan Ibu yang kami hormati, mohon izin, pelatihan vokasi kalau kita belajar dari berbagai

negara di luar negeri memang menjadi salah satu tonggak bagaimana memberikan solusi kepada tenaga kerja terhadap kebutuhan suatu kompetensi dan kemudian sertifikasi untuk memastikan mereka memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Dan ini menjadi salah satu, *next,* program strategis dari Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi, selain mungkin Bapak dan Ibu selama ini kita banyak berdiskusi terkait tentang regulasi, *law enforcement*, terkait tentang norma kerja dan norma K3, hubungan industrial antara serikat pekerja atau serikat buruh dengan pengusaha, kemudian ada *labor market information system*, maka optimalisasi ekosistem pelatihan vokasi nasional ini memang menjadi suatu hal yang kami pandang ini sangat strategis.

Jadi, kami melihat berbagai program strategis yang saat ini digulirkan oleh pemerintah, salah satu kunci sukses keberhasilan efektivitasnya itu adalah bagaimana kita menyiapkan SDM yang memiliki kompetensi dan sertifikasi yang memadai, termasuk di situ program-program seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, dan seterusnya. Dan peran BLK nanti, ya, sesuai dengan tema kita hari ini memang agar ekosistem pelatihan vokasi ini bisa masif, bisa efektif, bisa memberikan *impact*, memerlukan dukungan infrastruktur, dan seterusnya. Lanjut.

Ini adalah modalitas yang saat ini kami memiliki. Jadi, *goal* besarnya itu adalah membangun *link and match* antara pelatihan dengan kebutuhan industri. Kita memiliki standar kompetensi, ada sekian KKNI, SKKNI, ada sekian program pelatihan yang sudah tersedia di platform Siap Kerja.

Secara kelembagaan, kita memiliki BLK, kemudian kita memiliki instruktur yang sebenarnya saat ini *alhamdulillah* swasta itu sudah banyak terlibat. Jadi, kita sudah membangun sebuah ekosistem sebenarnya, dan total dengan asumsi *full capacity* kita bisa sebenarnya melatih sampai 1 juta orang per tahun, tapi ini tentu membutuhkan dukungan terkait dengan instruktur, kemudian juga operasional pelatihan tersebut. Lanjut.

Bapak dan Ibu yang saya hormati.

Terkait dengan infrastruktur Balai Latihan Kerja yang saat ini dimiliki oleh pemerintah, kami melihatnya itu kita bagi atas tiga. Yang pertama, itu ada yang disebut dengan UPTP BPVP, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Dan beberapa milik pemerintah itu ada yang berbentuk balai besar. Jadi, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, kita singkat dengan BBPVP, nah ini memang agak susah namanya, ya. Ini yang dikelola oleh pemerintah, ada 21 di 15 provinsi. Kemudian kita juga memiliki Satpel, jadi Satpel ini satuan pelayanan, pelatihan,

mereka belum mandiri, dibina oleh UPTP dan kita berharap ke depan Satpel ini kemudian bisa memainkan peran secara mandiri untuk melakukan pelatihan-pelatihan vokasi dan program-program peningkatan produktivitas.

Saat ini ada 13 lembaga dan ini juga jumlahnya bertambah karena ada beberapa nanti UPTD yang milik dari pemerintah daerah sudah mulai banyak yang kemudian mengusulkan untuk diambil alih oleh pemerintah, ya, karena mereka kesulitan dalam mengelola sesuai dengan kondisi *resource* yang mereka miliki di masing-masing pemerintah daerah. Dan itu ada 286 UPTD tersebar di 35 provinsi. Jadi, UPTD ini cakupannya masih terbatas dan pelatihannya itu juga program dan jenisnya juga terbatas. *Next*.

Bapak dan Ibu.

Ini adalah jenis dan kapasitas pelatihan di Balai Latihan Kerja Pemerintah. Ini kita bisa lihat tema-tema program pelatihan, jenis pelatihan ada teknik manufaktur, *refrigeration*, teknik elektronika, bangunan, *processing*, ada barista, ada tata busana, ada pariwisata dan seterusnya. Dan memang ini beragam, jumlah kapasitasnya beragam itu tergantung dari instrukturnya dan juga ketersediaan *workshop* dari masing-masing jenis atau program pelatihan. *Next*.

Sebagai tantangan yang pertama, memang sebaran Balai Latihan Kerja yang kita miliki saat ini, gambarannya seperti ini, yang jelas adalah belum ada sebaran yang merata. Dan kita sebenarnya berharap idealnya tiap provinsi itu memiliki satu UPTP setara dengan BPVP sehingga kita juga bisa melakukan pemerataan dalam hal kesempatan pelatihan kepada semua orang. *Next*.

Mengapa kemudian satu UPTP BPVP itu minimal harus ada di satu provinsi? Karena masing-masing provinsi memiliki kekhasan, keunikan, dan kemudian ada proyek-proyek nasional, strategis nasional di provinsi tersebut sehingga kita bisa merancang program pelatihan yang *dedicated* dan kita berharap nanti UPTP inilah yang nanti akan menjadi pembina, ya, lembaga pelatihan, ya, kerja, yang saat ini milik daerah ataupun swasta. *Next*.

Tantangan kedua yang kita hadapi memang adalah infrastruktur. Jadi, benar adanya Bapak dan Ibu, kita masih terus harus melakukan pengembangan terkait dengan infrastruktur, fasilitas yang kita miliki. Saya membayangkan dan tentu kita membayangkan Balai-balai Latihan Kerja yang kita miliki itu nanti hadir di tengah-tengah masyarakat, mampu memberikan jawaban kepada masyarakat bahwa kebutuhan masyarakat untuk mengembangkan kompetensi dan sertifikasi itu ada. Dan ini adalah kebutuhan infrastruktur, contoh di TIK, otomotif, las, dan seterusnya, dan bahkan di beberapa balai yang sudah ada pun kita perlu melakukan peremajaan dan seterusnya. *Next*.

Tantangan selanjutnya itu adalah terkait tentang instruktur. Jadi, saat ini kita memiliki instruktur seribu sekian orang, 1.052 orang, tersebar di 21 UPTP. Kalau dihitung sesuai dengan analisis beban kerja, maka kita kekurangan instruktur sebanyak 531 orang. Dan instruktur pun kita harus punya program kepada mereka untuk mereka terus bisa mengembangkan *skill*-nya. Dan ini adalah peta kekurangan instruktur itu ada di mana.

Slide terakhir, Bapak dan Ibu, ini adalah gambaran tantangan yang tadi ada 1, 2, dan 3, bagaimana strategi kami di Kementerian Ketenagakerjaan. Yang pertama, memang penambahan fasilitas itu selalu kemudian menjadi orientasi kami, bisa dengan melibatkan juga pihak industri. Jadi, ada beberapa industri yang sudah membantu Kemnaker, ya, fasilitas-fasilitas *workshop* atau peralatan itu kita optimalkan. Kemudian, kita berusaha provinsi-provinsi yang kemudian masih kosong untuk dikembangkan Satpel yang baru, kemudian transformasi Satpel menjadi UPTP, kemudian ada juga pendanaan dari pihak luar dan ini tentu kami butuh dukungan dan *support* dari mitra Komisi IX, ada program *list draft* dari World Bank.

Kemudian terkait dengan instruktur, kita juga sekarang sedang mengembangkan kurikulum yang bersifat, kami sebut sebagai *future skill*, yang saat ini berlangsung ToT untuk instruktur kita untuk *future skill*.

Boleh tambah 3 menit, Pak Pimpinan?

Kemudian, program strategi transformasi BLK lainnya, ini adalah kami mendorong pelatihan BLK dan pemagangan untuk pemenuhan kebutuhan tenaga kerja, untuk proyek prioritas pemerintah. Jadi, kami juga ingin menyampaikan, Bapak dan Ibu, kita sekarang sedang fokus salah satunya itu adalah dengan kerja sama dengan Kementerian Koperasi, bagaimana balai-balai kami juga men-*support*, ya, program pemerintah 80.000 koperasi, tentu membutuhkan sekian banyak tenaga pengelola koperasi dengan kompetensi yang harus memadai dan harus standar. Dan ini merupakan salah satu juga bentuk kolaborasi lintas kementerian sehingga kita berharap terjadi standarisasi kompetensi sehingga program terkait tentang koperasi 80.000 itu juga bisa berjalan dengan baik.

Dan contoh yang lain adalah, *next*, terkait tentang transformasi BLK. Saat ini kami sedang menyiapkan *project-based learning* berskala nasional. Kami melihat tadi sekian banyak program pelatihan yang sudah dimiliki BLK, tapi kita perlu melakukan pembaharuan dari segi kontennya. Ini adalah hasil studi yang sudah dilakukan di Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi, ingin kami laporkan, ingin kami sampaikan bahwa di balai-balai kita sekarang sedang disiapkan 4 program pelatihan, *project-based learning*, dan kita berharap *project-based learning* ini

menjawab kebutuhan terhadap *skill set* masa depan dan kemudian *skill-skill* yang akan berkembang, ya, jadi mereka juga bisa mengembangkan secara mandiri. Dan *skill* yang kami anggap sekarang dibutuhkan oleh industri. Apa saja itu?

Yang pertama adalah *smart operation*, di situ ada *smart farming*, *smart manufacturing.* Kemudian *smart creative IT skills*, di situ ada *content creator*, pengembangan web, dan seterusnya, dan *agroforestry*, kami bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan di beberapa *selected* BLK. Dan kemudian ada pelatihan-pelatihan *green jobs*, ini juga nanti akan men-*support* program Pak Presiden terkait tentang ketahanan energi fokus pada *renewable energy*.

Baik, Bapak dan Ibu, Bapak Pimpinan, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi dan kami yakin tantangan yang kami hadapi saat ini terkait tentang bagaimana kita bisa memperkuat BLK yang saat ini kita miliki bersama, tentu dukungan dari Komisi IX ini sangat penting dan saya yakin ketika kita bersama *insya Allah* harapan masyarakat terkait dengan ketersediaannya program-program pelatihan untuk kebutuhan mereka untuk meningkatkan kompetensi atau pun kebutuhan industri untuk melakukan re-*skilling*, *upskilling*, itu kita bisa jawab bersama.

Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang pas.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (CHARLES HONORIS/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Terima kasih, Pak Menteri. Paparannya cukup komprehensif.

Kita berikan kesempatan selanjutnya kepada Saudara Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Silakan, Pak.

KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI (SYAMSI HARI, S.E., M.M.):

Terima kasih, Pimpinan Rapat.

Bapak dan Ibu semuanya,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kepada yang terhormat, para Anggota Komisi IX,

Izin memperkenalkan diri dari BNSP, saya Syamsi Hari. Di sebelah saya ada Wakil Ketua, Ibu Ulfah Mashfufah, kemudian di sebelah lagi ada Pak Miftakul Azis, di belakang ada Pak Adi Mahfudz Wuhadji, serta Pak Muhammad Nur Hayid, dan ada Pak Amilin. Satu lagi sedang dengan OJK, Bapak (suara tidak jelas) untuk ventura modal, Bapak.

Perdana kami di sini, Bapak, dengan teman-teman, di sini kami hadir, *insya Allah* kita bisa memaparkan sesuatu hal untuk percepatan sertifikasi kompetensi kerja. *Next*.

Ini sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional.

KETUA RAPAT (CHARLES HONORIS/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Pak, Pak Ketua.

Sebelum dilanjut boleh dijelaskan dulu enggak? Mungkin bagi beberapa Anggota yang masih belum terlalu mengetahui apa itu BNSP, mungkin dikasih prolog dulu, lembaga Bapak ini lembaga apa sebetulnya.

Silakan.

KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI (SYAMSI HARI, S.E., M.M.):

Baik.

Bapak dan Ibu.

Jadi, BNSP ini Badan Nasional Sertifikasi Profesi, sama kita di PP 10 Tahun 2018, mempunyai tugas dan fungsi untuk sertifikasi kompetensi, pelaksanaan, kemudian pembinaan, pengawasan pengembangan, *monitoring*, serta sampai di nasional maupun internasional, Bapak dan Ibu.

Jadi, kami di, kita di BNSP ini memberikan lisensi kepada LSP. Memberi amanat kepada LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. LSP ini baru nanti mengasesi kepada teman-teman di lapangan. Tentunya di LSP ini memiliki kriteria prosedur mutu terhadap jajarannya, mulai dari pengelola hingga pada asesor. BNSP ini di LSP tersebut ada di 21 sektor, Bapak dan Ibu. Jadi, ada 21 sektor, semuanya lini ada di dalamnya untuk mengembangkan dan memastikan kita mutu dari jasa orang kompeten.

Demikian, Bapak dan Ibu.

Sudah bisa lanjut, Bapak. Terima kasih.

Jadi, Sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional ini semuanya untuk adalah mutu, Bapak dan Ibu. Dan sehingga Sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional ini merupakan upaya meningkatkan daya saing untuk pekerja Indonesia, baik di dalam negeri maupun untuk ke luar negeri. Jadi, dengan mekanisme asesmen berbasis kompetensi ini yang dilaksanakan oleh LSP, nah sehingga kebutuhan industri yang melibatkan asosiasi profesi ini kita bisa melihat bahwasanya dari kelembagaan, terlibat asosiasi, terlibat lembaga pelatihan, juga skema, juga SDM, asesor, dan materi ujinya. *Next*.

Jadi, mandat dan regulasi tugas fungsi BNSP ini, Bapak dan Ibu yang terhormat, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 18, dan PP Nomor 10 terakhir kemarin tahun 2018 tentang BNSP, di mana merupakan lembaga yang independen dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab kepada presiden. Dan Pasal 3-nya pun mempunyai tugas melakukan sertifikasi kompetensi kerja sehingga dalam 6 tugas dan fungsi ini yang tadi kami sebutkan adalah pelaksanaan pengembangan, pembinaan pengawasan tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pendukungnya adalah Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Dan ada satu hal lagi di Instruksi Presiden 9 Tahun 2016 ini mengenai kompetensi untuk di Sekolah Menengah Kejuruan dan menangkap peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia.

Selanjutnya, sejarah tentang BNSP sendiri dari 2003 hingga sekarang 2023, dan periode kami di 2023 hingga 2028. Dan tadi sudah ada mandat dan tugasnya terbilang bahwasanya PP Nomor 10 Tahun 2018. Dan sebelumnya memang ada, Pak, di situ ada PP Nomor 23 di Tahun 2004 tersebut mengenai BNSP. Jadi, dua kali PP dan satu Instruksi Presiden. Lanjut.

Tadi kita sudah terangkan, Bapak, dari PP Nomor 10 ini Ketua, Wakil Ketua dan Anggota semua total berjumlah tujuh orang, Bapak, dan kami didukung sekretariatnya dari ASN dan PPPK dari Kemnaker, Pak. Jadi, dari Pak Menaker kami dapat dukungan untuk sekretariatnya, Bapak dan Ibu. Lanjut. *Next. Next*.

Maaf, ini tadi saya sebutkan, ya, Pak, ya, untuk Bu Ulfah, Pak Azis tadi, anggota tadi kita tugaskan berdasarkan sektor, Bapak dan Ibu, sektor dan bidang. Seperti contoh, Bu Ulfah ini secara kesehatan di bidang juga sebagai koordinator untuk kelima anggota kami. Pak Azis, sektornya pertanian, kehutanan, perikanan,

pertambangan, tapi punya bidangnya di SDM sertifikasi. Jadi, dua tugas juga, tentang sektor dan tentang bidangnya. *Next*.

Sumber daya kami, Bapak dan Ibu, ini ada LSP 2.458 yang tersebar di 21 sektor. Adapun untuk melakukan uji, kami melakukan uji ini memiliki tempat uji sebanyak 56.504 dan untuk menunjang itu ada skema yang kita identifikasi sebarannya sekitar 31.651 skema dan terbarukan terus untuk *upgrading*, kami melakukan materi uji kompetensi versi 2023 kemarin kepada SDM kami di asesor kompetensi.

Adapun jenis LSP kami, Bapak dan Ibu, ada di P1, P2, dan P3. P1 ini untuk lembaganya sendiri ini biasa di SMK, perguruan tinggi, ya, dan lingkungan untuk pendidikannya sendiri atau pelatihannya sendiri, ini berjumlah 1.790. Untuk LSP P2 dan berjumlah 133 ini ternyata ini di BLK Kemnaker, kemudian K/L, dan industri lainnya, Bapak/Ibu. Kemudian, di LSP 2 ini adalah jejaring, khusus jejaringnya dengan dirinya sendiri. Dan P3 ini swasta murni, ini ada 535 dengan berbagai juga skemanya dan kejuruannya. *Next*.

Kami gambarkan, Bapak dan Ibu, untuk Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja ini berbanding agak sedikit jauhnya, ya, Pak. Selama 5 tahun terakhir ini 5.105.260 orang, tapi berbanding jauh dengan angkatan kerja yang 153 juta ini. *Next*.

Dan ini ada tantangan, terhadap pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja kami dengan adanya ketersediaan standar kompetensi dan okupasi nasional dan sehingga ini terdapat standar kompetensi kerja yang belum dilengkapi dengan SKKNI, juga jabatan. Namun, rapat jabatan namun belum tersedia standar kompetensi kerja, ini menjadi, jadi pelaksanaan sertifikasi kompetensi, optimalisasi.

Akses pelayanan sertifikasi juga masih terbatas, tempat uji dan asesor kompetensi ini belum tersedia di seluruh Indonesia, serta layanan kompetensi belum banyak memanfaatkan teknologi informasi. Tiganya adalah pengakuan sistem sertifikasi belum menyeluruh sehingga pengakuan-pengakuan sertifikasi ini di dalam masyarakat, di, terutamanya di industri belum semuanya mengakui untuk adanya kompetensi tersebut. Beberapa perusahaan sudah sangat mengakui bahkan untuk seleksi dan promosi jabatan.

Kemudian juga dalam hal pendidikan dan pelatihan, sepenuhnya terintegrasi dengan sertifikasi kompetensi kerja, di mana semua pelatihan belum tersertifikasi baik di K/L ataupun di Badan sehingga jumlah pekerjaan yang ada dalam sertifikasi ini juga menjadi gap, hanya sebesar 0,78% dari angkatan kerja yang ada.

Dengan penjaminan mutu, sertifikasi juga masih kurang, masih tidak dapat praktik pelaksanaan sertifikasi yang belum sesuai dengan prosedur dan sertifikasi kompetensi juga mengikuti berbagai negara yang ada. Jadi, sebagai parameter kita juga, berbagai negara melakukan kompetensi sebagai gambaran kita juga. *Next*. Lanjut.

Sehingga strategi percepatan kita, Bapak dan Ibu, adanya kolaborasi dengan K/L, ini kita menghasilkan 2.522, itu sudah untuk okupasi, tetapi juga di 2025 ini kita dalam proses 969 okupasi nasional di 9 sektor. Pengembangan skema juga kita lakukan terhadap beberapa K/L sehingga menghasilkan dalam 2025 ini 896 skema sertifikasi nasional.

Kemudian juga, Bapak/Ibu yang terhormat, digitalisasi *plan* BNSP dan kita melakukan dengan sertifikasi jarak jauh. Jarak jauh ini beberapa sudah bisa kita lakukan.

Penyederhanaan regulasi yang dari 22 menjadi 4 peraturan, kita sederhanakan, dan mencabut peraturan yang tidak harmonis sehingga juga harmonisasi dengan luar negeri kami lakukan, dengan AGP, kemudian ASEAN, Malaysia tidak, ya, Korea Selatan. Kerja sama ini juga di dalam, kita dengan KADIN dan APINDO, beberapa contoh dengan BPSDM Kelautan, Kemenpar, terakhir dengan Kemenpar dan ada dengan Bank Indonesia.

Terakhir, Pengembangan Penjaminan Mutu Sertifikasi. Kita melakukan *surveillance*, Bapak/Ibu yang terhormat, juga ada pemberian sanksi kami kemarin dan ada pencabutan lisensi kepada LSP yang tidak memenuhi syarat atau persyaratan prosedur. Dan pemanfaatan *toolbox* di bidang parwisata, serta penerapan MUK versi terbaru, juga menjadi bantuan *monitori* kita bersama K/L-K/L, Bapak/Ibu, karena K/L-K/L ini memberikan rekomendasi kepada LSP.

Demikian, Bapak dan Ibu yang terhormat, kami sampaikan arahan dan masukan. Terima kasih.

Wabillahi taufik wal hidayah,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (CHARLES HONORIS/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Baik, terima kasih, Pak Ketua BNSP.

Kita langsung saja masuk ke sesi pendalaman, di meja kami sudah ada daftar beberapa Anggota Komisi IX yang ingin menyampaikan pendalaman.

Kita mulai dari sisi kanan, Pak Zainul Munasichin dari Fraksi PKB dan *stand by*, Pak Muhammad Haris dari Fraksi PKS.

Silakan, Pak Zainul.

F-PKB (ZAINUL MUNASICHIN, M.A.):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan Komisi IX yang saya hormati,
Pak Menteri Tenaga Kerja, Pak Wamen, beserta Pak Sekjen dan seluruh jajaran,
Kepala BNSP dan seluruh Anggota yang saya hormati.

Pertama, saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran Pak Menaker beserta dengan BNSP. Ini BNSP ini, kan, di bawah Kemnaker, ya, Pak, ya, secara kelembagaan.

Oh, independen, tapi *supporting*-nya di Kemnaker. Oh iya, *oke.*

Bapak/Ibu sekalian.

Kalau kita baca laporan dari Kementerian Investasi, kuartal pertama investasi yang masuk ke Indonesia itu naik 16%, Pak. Jadi, investasi yang masuk ke negara kita ini betul-betul progresif. Angkanya mencapai Rp486 triliun,tapi kenaikan investasi yang 15% ini ternyata tidak diikuti dengan serapan tenaga kerja yang maksimal. Serapan tenaga kerjanya tidak sampai 600.000 tenaga kerja yang terserap dari investasi yang masuk Rp486 triliun. Kalau dibuat indeksnya, antara tenaga kerja yang diserap dengan nilai investasi itu jauh, Pak. Satu tenaga kerja itu, itu butuh Rp700 juta, jadi investasi Rp700 juta menghasilkan satu tenaga kerja. Ini yang sering disebut ekonomi biaya tinggi itu ini disebutnya, Pak.

Jadi, saya investasi Rp700 juta, tapi saya hanya bisa merekrut satu tenaga kerja. Ada banyak faktor tentu, ya, yang kebocoran, termasuk yang Pak (suara tidak jelas) sampaikan itu, hambatan investasi, ormas-ormas segala macam itu mungkin salah satu di situ. Jadi, Rp700 juta itu tidak langsung ter-*direct,* jadi mungkin dari Rp700 juta itu yang benar-benar dipakai untuk investasi, mungkin hanya sekitar, ya, Rp500 juta atau Rp400 juta, kemungkinan, ya. Kenapa? Karena kalau kita membandingkan dengan MBG saja, MBG itu indeksnya Rp71 triliun MBG itu di mana satu dapur merekrut 50 tenaga kerja dengan 5.000, itu berarti, kan, 250.000, Pak, tenaga kerja, dengan Rp71 triliun. Jadi, indeksnya itu satu tenaga kerja itu Rp250 juta, tiga kali lipat dari *gap* investasi yang masuk ke

Indonesia ini. Jadi, kalau kita mau *government as manager* dengan cara padat karya, model MBG itu, itu jauh lebih konkret, ya, dibandingkan investasi yang masuk ke kita ini yang kadang-kadang tidak relevan, tidak, tidak *match* dengan serapan tenaga kerja.

Pertanyaannya adalah, ada banyak kemungkinan, Pak. Yang pertama mungkin investasinya memang padat modal, bukan padat karya, mungkin begitu. Yang kedua mungkin banyak kebocoran, mungkin. Yang ketiga, ini yang saya khawatir ini, Pak, jangan-jangan memang kita tidak cukup siap untuk menyiapkan SDM untuk menyerap pasar kerja itu. Jadi, kenapa investasi naik, tapi serapan tenaga kerjanya sedikit, jangan-jangan memang antara *job* yang tersedia dengan SDM yang tersedia itu enggak, enggak menyambung kompetensinya. Nah, ini yang kenapa kita menjadi relevan bicara Kemnaker bersama dengan BNSP itu di sini, Pak, begitu.

Nah, tadi dari Pak Menteri dan BNSP sudah menyampaikan, ya, bagaimana situasi terkini dari percepatan terkait dengan sertifikasi kompetensi ini. Karena apa? Karena hari ini sertifikasi kompetensi itu, itu di pasar kerja itu sering kali lebih diutamakan daripada ijazah, Pak. Betul, ya? Jadi, walaupun toh dia S1 Teknik, apa, mesin, tapi dia tidak punya sertifikasi kompetensi, itu kalah dengan misalnya orang yang dia bukan S1, tapi dia punya mengantongi sertifikasi kompetensi, dia bisa lebih diterima, begitu. Nah, itu di banyak sektor sekarang seperti itu.

Nah, saya ingin melihat sebetulnya, karena begini, kan ada beberapa level, Pak, jadi antara *job* yang tersedia dengan pekerja yang kita latih, dari yang kita latih, yang kita sertifikasi, yang kita sertifikasi baru ditempatkan, kan, begitu alurnya. Saya ingin tahu sebetulnya, Pak, dari yang dilatih di BLK itu, berapa persen yang disertifikasi dan dari disertifikasi itu berapa persen yang diterima. Nanti akan, akan kelihatan, Pak, efektivitas dari masing-masing tahapan ini, begitu. Kenapa? Karena jangan sampai misalnya begini, Bapak melatih jutaan orang, tapi enggak diserap di pasar kerja, karena enggak disertifikasi. Jangan-jangan seperti itu.

Atau Bapak latih misalnya 1 juta orang disertifikasi, misalnya 700.000 orang, tapi yang diserap hanya 500. Kan harus dievaluasi lagi ini, Pak. Jangan-jangan ada yang enggak pas ini di dalam disertifikasi kita. Apakah SKKNI-nya yang mungkin perlu dilihat lagi, mungkin seperti itu.

Saya kira itu mungkin beberapa catatan saya, Pak. Karena sayang sekali, Pak, investasi naik, tapi serapan tenaga kerjanya kecil, sayang sekali. Harus kita manfaatkan semaksimal mungkin.

Terima kasih.

Wallahul muafiq ila aqwamitthariq,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (CHARLES HONORIS/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Baik, terima kasih, Pak Zainul Munasichin.

Selanjutnya Bapak Muhammad Haris, dan *stand by*, Ibu Sri Meliyana.

Pak Haris ada? Pak Haris, Silakan.

F-PKS (Dr. H. MUH. HARIS, S.S., M.Si.):

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Menteri, Pak Wamen, Pak Sekjen, dan seluruh jajaran,
Bapak Ketua BNSP dan seluruh Anggota, tentu
Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IX.

Yang pertama, tentu kami atau saya sendiri mengapresiasi kepada Pak Menteri yang tadi saya kira punya rencana obsesi yang luar biasa dalam rangka tentu mencari solusi bersama, ya, terhadap problem di negara kita yang berkait dengan ketenagakerjaan.

Pak Menteri, sekarang ini itu hidup pada suasana transisi, di mana sektor pekerjaan yang lama itu sudah enggak menarik lagi. Saya hidup pada zaman Pak Gubernur, Pak Bibit Waluyo, sering kali berseloroh begini, anak sekarang itu kalau disuruh memacul, enggak bisa, enggak tahu lagi caranya, bagaimana cara memacul, begitu. Walaupun lahannya banyak, akhirnya lahannya dijual, dibelikan motor untuk mengojek, begitu, dan tentu itu satu kemunduran yang luar biasa. Nah, oleh karena itu, Pak Menteri, saya kira perlu berpikir keras menjawab persoalan ini.

Fakta yang juga kami jumpai di dapil saya, Dapil Jawa Tengah I, Semarang dan sekitarnya, itu ada kerontokan industri manufaktur yang luar biasa, utamanya garmen. Pada masa kita SMA, itu menjadi pegawai atau buruh pabrik garmen lebih diminati ketimbang ASN, atau PNS istilah zaman dulu, tapi sekarang tinggal cerita, yang namanya Damatex dari Salatiga, kemudian Tex-Tex-Tex yang lain, terakhir Sritex di Solo sudah jebol semuanya, begitu, dan tentu implikasinya luar biasa. Pak Wamen pernah juga, kan, Pak Menteri juga pernah mengunjungi situ.

Nah, keberadaan tadi, lembaga yang susah namanya itu BBPVP, begitu, ya. Yang kemarin saya begitu dipindah tugaskan di IX itu, hari Kamis lalu saya datang ke sana, itu potensi luar biasa. Dari sisi luas wilayahnya, itu susah mencari tempat hampir 10 hektare di tengah kota Semarang itu, itu barang yang langka. Kalau saya berseloroh, itu kalau enggak zaman Pak Harto enggak bisa, begitu, bisa punya tanah seluas itu, begitu.

Nah, mohon, Pak Menteri, optimalisasi hal-hal seperti itu perlu ditingkatkan, juga mungkin balai-balai yang lainnya dengan modifikasi yang lebih beragam, begitu, ya. Artinya seperti tadi, meracik kopi itu, istilahnya apa itu, nah barista itu saya kira perlu tidak hanya di kota Semarang, perlu dipikirkan bagaimana balai itu juga punya jaring di kabupaten/kota karena itu tentu jauh lebih menarik dibanding dengan tadi saya katakan bekerja di sektor konvensional yang sudah lama enggak diminati tadi, atau juga jenis yang lain.

Jadi, poinnya adalah Pak Menteri perlu berpikir keras mencari sekian banyak alternatif sehingga anak-anak muda ini yang katanya disuruh kuliah, kata mereka setelah lulus juga menganggur juga pada akhirnya, begitu. Bahkan saya itu punya lembaga pendidikan, satpam kami yang penjaga parkir itu S2, begitu. Ada yang ironis lagi, yang mencuci itu Hafizah itu, disuruh, apa, mengajar enggak mau, lebih suka jaga parkir, enggak pakai pikir kata mereka itu. Nah, ini yang pertama.

Yang kedua, Pak Ketua, Pak Kepala BNSP, ini agak, ya, menarik dan agak ironis di tantangan pelaksanaan sertifikasi halaman 9 Bapak itu. Jadi, misalnya di nomor 2 itu, nomor 2b, layanan sertifikasi kompetensi kerja belum banyak memanfaatkan teknologi informasi. Saya kira ini agak, agak janggal, agak ironis nih. Di era sekarang ini hampir tidak ada sektor mana pun yang tidak optimal dalam hal itu, begitu. Kalau dulu orang usaha itu selalu berpikir, apa, tempat, harga, 4P, begitu, ya, *price, place, promotion* dan lain sebagainya, tapi sekarang ini, kan, enggak sama sekali. Ada tadi Ibu, Ibu, *ngendiko,* mi Jogja itu di pelosok dalam itu ya, itu dicari juga walaupun tempatnya di, di, di dalam misalnya, begitu, ya, kenapa masih terjadi persoalan pada era ini kesulitan untuk manfaatkan teknologi informasi tadi ini, ini ada *problem* apa, kok, bisa terjadi hal seperti itu.

Yang kedua, di poin yang ketiga juga saya masih menyokong tentang pengakuan sertifikat kompetensi kerja belum sepenuhnya dijadikan sebagai persyaratan masuknya kerja. Saya kira ini tinggal, karena Bapak independen, ya, tidak semata di bawah Kemnaker, kan, lincah sebetulnya, begitu, artinya bisa ke mana-mana untuk menyampaikan bahwa barang yang Bapak miliki ini memang layak, begitu, ya, layak menjadi bukti standar kompetensi orang untuk bekerja. Nah, sehingga menurut hemat kami perlu berpikir keras atau bahkan juga

ditanyakan kenapa sampai terjadi seperti itu sehingga Bapak punya persoalan yang tertulis di halaman 8 poin 3 itu.

Sekaligus juga yang b itu, kementerian/lembaga belum semuanya mengatur tentang penerapan standar kompetensi kerja dan pengakuan sertifikasi kompetensi kerja. Saya kira ada, ada problem apa sehingga ada kesulitan untuk masuk di, di kementerian/lembaga yang lainnya.

Saya kira itu, Pak Ketua, yang saya sampaikan. Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (CHARLES HONORIS/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Baik, terima kasih, Pak Muhammad Haris.

Selanjutnya Ibu Sri Meliyana dan *stand by* Pak Nurhadi. Silakan, Bu Meli.

F-P. GERINDRA (Ir. SRI MELIYANA):

Terima kasih, Ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua dan Anggota Komisi IX yang saya sayangi dan banggakan,
Pak Menteri beserta jajaran, Ketua BNSP yang kami hormati.

Sebenarnya bicara tentang BLK, tentang standar, itu menjadi suatu kebutuhan sekarang ini, Pak. Di daerah saja, mereka yang pernah dilatih di BLK dengan mereka yang autodidak sudah kelihatan banget bedanya. Pada skala kecil usaha, pemberi kerja sudah bertanya, Pak, "Sudah dapat pelatihan belum?," "Pernah dapat pelatihan belum?," dan orang-orang yang pernah mendapat pelatihan itu lebih percaya diri dari orang-orang yang, "Saya bisa kerja apa saja," begitu, lebih percaya diri, itu di satu sisi. Apalagi ketika mereka sudah dapat sertifikat, Pak. *Double* percaya dirinya, lebih, lebih, lebih *bargaining* terhadap banyak hubungan kerja, begitu.

Nah, ini, ini terjadi, apa, dengan cukup masif akhir-akhir ini, Pak. Jadi, harapan kami memang BLK ini memberikan bimbingan pada semua tataran umur kerja. Walaupun tadi Pak Menteri memaparkannya dengan potretnya sudah lengkap, Pak, tinggal apa yang akan kita lakukan, begitu, lho. Optimalisasi saja tanpa perbaikan infrastruktur rasanya berjalan pelan, Pak. Nah, kita sudah mulai harus memikirkan benar-benar terjadi pelatihan yang masif kepada tenaga kerja

kita dalam berbagai tataran, tamat SMK kah, tamat SMA kah. Ketika mereka memasuki dunia kerja, tersedia BLK, Pak.

Nah, kalau tadi saya coba baca peta ini, Pak, peta di halaman 8. Tantangan satu, sebaran Balai Latihan Kerja pemerintah, yang, yang garis abu itu jumlah UPTP-BPVP, masih terdapat 6 provinsi yang belum memiliki, tapi kalau lihat yang garis abu-abu isinya 0, itu saya hitung 22, halaman 8. Nah itu yang 6 provinsi itu yang mana? Yang 22 yang masih 0 ini, memiliki apa? Khusus untuk halaman 8 karena masih sulit membacanya.

Nah, kemudian ke halaman-halaman selanjutnya, urgensi tiap provinsi memiliki minimal 1 UPTP-BPVP. Pak, banyak BLK di provinsi. Saya enggak tahu bagaimana cara pengelolaannya sehingga kalau kami datang ke provinsi mereka menitipkan mau balikkan BLK itu ke pusat. Dan ini terjadi di mana-mana, Pak, tidak di satu provinsi saja saya temui *statement* yang seperti ini. Masalahnya apa, Pak? Apa sedemikian tidak ada dananya sehingga mereka tidak bisa lagi mengelola BLK provinsi itu.

Nah, Bapak bercita-cita kita punya minimal 1 UPTP-BPVP itu, sementara BLK di provinsi sendiri tidak cukup kuat untuk beroperasi menjadi BLK yang produktif, tapi beberapa BLK, Pak, skala kabupaten, kadang-kadang juga luar biasa kegiatannya. Nah, saya mengharapkan sekali, selain optimalisasi dengan kondisi yang sudah ada ini, kita sudah mulai memikirkan anggaranya, Pak. Jika kita benar-benar ingin memberikan keahlian pada setiap angkatan kerja kita, maka saya yakin BLK jawabannya, Pak. Untuk membuat mereka lebih pede, lebih ahli, dan lebih siap memasuki dunia kerja.

Jadi, yang disebut *urgency*, yang disebut tantangan kondisi infrastruktur, ada termasuk juga instruktur, itu menjadi, saya rasa, prioritas, Pak, kalau memang kita mau mengurangi angka pengangguran dan lain-lain. Jadi, tidak, ini bukan, bukan sesuatu yang bisa ditunda lagi menurut saya, Pak. Menjadi satu, satu PR besar dari kawan-kawan di Disnaker untuk membuat dia bisa menyentuh semua angkatan kerja.

Nah, dan kemudian untuk sertifikasi-sertifikasi, apa Pak kendala utamanya? Sehingga senjang banget yang sudah punya sertifikat dan yang belum angkatan kerja kita ini. Apa yang mereka butuhkan dan kerja sama seperti apa yang membuat BNSP itu bisa menguji lebih banyak dan memberikan sertifikat lebih banyak. Kalau diuji lebih banyak dan tidak lulus lebih banyak juga sedih, ya, Pak. Nah, jadi, koordinasi seperti apa? Walaupun independen, saya rasa pengaruh besar dari, apa, *good will*-nya Kemnaker itu mempengaruhi, apa, kemampuan setiap orang untuk mendapatkan sertifikasi. Nah, kami ingin tahu pada kondisi sekarang seperti apa kerja samanya, Pak? Dan seperti apa yang diharapkan pada

waktu yang akan datang untuk sekali lagi menyiapkan keahlian kerja pada setiap umur kerja, Pak, pada setiap tingkat pendidikan juga, tentu.

Itu, Ketua, terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (CHARLES HONORIS/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Terima kasih, Ibu Sri Meliyana.

Selanjutnya Pak Nurhadi dan *stand by* Ibu Netty. Pak Nurhadi, silakan.

F-P. NASDEM (NURHADI, S.Pd., M.H.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI, Pak Menteri, Pak Wamen, beserta jajaran, juga Kepala BNSP beserta jajaran.

Saya pertama menyoroti terkait Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Pak, dari berbagai paparan tadi saya menyimpulkan ada dua hal yang mendasar sekali yang menjadi persoalan. Walaupun sebenarnya ketika Pak Prabowo ini melantik Bapak Prof. Yassierli dan juga Pak Noel ini saya sangat optimis, ini kalau istilah Jawa, *tumbu oleh tutup*, Pak, Pak Prof. Yassierli ini orang akademisi, ya, tentu sudah piawai dalam merumuskan strategi bagaimana mencari solusi-solusi yang terbaik untuk permasalahan ketenagakerjaan di negeri kita. Pak Noel ini cekatan sekali, kita lihat ada ijazah ditahan langsung terjun, ada perusahaan yang kayanya bermasalah kaitannya ada potensi di-PHK, beliau langsung turun, saya sangat mengapresiasi ini.

Tetapi, Pak, sampai hari ini saya masih belum merasakan ada satu gebrakan yang cukup positif dari duet kepemimpinan ini. Terutama kaitannya dengan infrastruktur dan instruktur, Pak. Dari paparan Bapak tadi, saya melihat masih ada 6 provinsi yang tidak ada BLK pusat, walaupun kita juga sudah ada 21 UPTP-BPVP yang dikelola, walaupun itu jumlahnya masih kurang dan tadi Bapak juga menyampaikan kita kekurangan 531 instruktur di 21 balai pelatihan, menurut saya ini cukup ironi. Ke depan, kalau Bapak mencanangkan program-program BLK ataupun sejenis, saya harap ini juga disertai dengan kesiapan instruktur, seperti yang halnya yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional yang menyiapkan SPPI, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, di mana ada 30.000 dapur, di

situ disiapkan ada 90.000 SPPI yang terdiri kepala dapur, kepala gizi, dan juga bagian admin.

Saya harap Bapak juga menduplikasi itu sehingga nanti BLK yang sudah berdiri tidak vakum, Pak. Karena bagaimana BLK kalau menurut saya tidak hanya sekadar infrastruktur, tapi seperti mesin produksi tenaga kerja yang berkompetensi tinggi harusnya. Kalau instruktur saja tidak ada, tidak tersedia, nah bagaimana kita bisa mencetak SDM yang unggul, Pak.

Nah, ini yang saya tanyakan, bagaimana dari Pak Menteri dan Pak Wamen ini langkah-langkah percepatan yang disiapkan untuk menutup *gap* ini, Pak, sehingga ada pelatihan instruktur dan disesuaikan juga dengan kebutuhan industri masa depan, termasuk juga perkembangan AI yang sangat-sangat pesat, yang pertama.

Yang kedua, kaitannya dengan BNSP, sekitar 140 juta angkatan kerja baru kurang dari 10 juta, Pak, ya, memiliki sertifikasi kompetensi. Artinya hanya tadi 0,78% saja dan juga lebih dari 90% lembaga sertifikasi profesi belum digitalisasi, 70% tempat uji kompetensi masih terpusat di kota besar. Ini realitas yang harus dijawab dengan langkah konkret menurut saya. Saya ingin BNSP ini jangan hanya menjadi lembaga yang bersifat sertifikasi, tapi terkesan elitis, begitu, Pak, tapi kita malah melupakan akar rumput pekerja, seperti pekerja seni, buruh harian, pengrajin, tukang las, dan lain sebagainya yang harusnya paling mudah mengakses sertifikasi.

Menurut saya, jika pemerintah ingin daya saing tenaga kerja ini bisa meningkat, bukan hanya kita mendengung-dengungkan menyuruh rakyat untuk bersertifikasi, tapi negara harus benar-benar hadir, memastikan sertifikasi ini mudah, murah, dan juga relevan.

Itu, Pimpinan, terima kasih dari saya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (CHARLES HONORIS/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Terima kasih, Pak Nurhadi.

Selanjutnya Ibu Netty dan *stand by* Bapak Sahidin, ya.

Silakan, Bu Netty dulu.

F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.):

Terima kasih, Pimpinan, atas kesempatan yang diberikan.

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang menjelang sore,
Dan salam sejahtera untuk kita semua.

Pimpinan dan juga Anggota Komisi IX DPR RI yang saya cintai, saya banggakan,
Saudara Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia beserta seluruh Jajaran dan juga Ketua, ya, Ketua BNSP.

Ini tampaknya kita baru bertemu ini, ya, dalam rapat di Komisi IX. Tentu saja kita punya *concern* yang sama, ya, Pak Menteri, dengan yang Bapak paparkan tadi. Dan dalam masa reses kemarin, ini saya perlu ceritakan, nih, Pimpinan, saya datang ke BP, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas di Bandung, ya. Jadi, saya akhirnya harus mengoreksi, ya, persepsi saya selama ini tentang BLK, utamanya BLK yang memang dikelola oleh Kemnaker. Kalau selama ini saya sering katakan, *ngelihat* BLK itu seperti judul film, *Night at the Museum,* begitu, tapi itu tidak berlaku pada Balai Pelatihan.

Betul, ya, Mbak Indah, ya.

Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas di Bandung, Pak. Kenapa? Karena pada saat saya berkunjung ada dua siswa SMK yang akan diberangkatkan mengikuti kompetisi internasional nanti bulan September atau Agustus, begitu, ya, di Filipina kalau enggak salah, ya, dan luar biasa latihannya di sana, berbulan-bulan, memiliki keterampilan yang luar biasa. Termasuk ketika saya masuk ke beberapa ruang, ya, itu tidak menggambarkan sedang di BLK, Pak Menteri, tapi sedang di kafe. Pak Wamen sudah ke sana belum? Harusnya ke sana itu, ya, bikin *podcast*.

Nah, jadi artinya, kalau kemudian tadi Pak Menteri katakan kita berharap masih bisa menambah jumlah UPTP di setiap provinsi, saya sangat mendukung, Pak, begitu, saya sangat mendukung. Jadi artinya, kalau ini bisa menjadi salah satu daya ungkit kita untuk mempersiapkan SDM kita, ya, apa yang ditampilkan di BPVP Bandung itu menjadi salah satu *pilot project*, ya, di tiap provinsi.

Dan saya menggarisbawahi tadi Pak Menteri katakan, bahwa setiap daerah, setiap provinsi, punya kekhasan, keunikan, ya, termasuk misalnya di beberapa wilayah sedang dikembangkan potensi pariwisatanya. Nah, tentu ini

juga menjadi satu hal yang harus dipertimbangkan. Jadi, artinya kalau kemudian, Pimpinan, kalau ada kesempatan, ya, anggaran ini diperbesar untuk Kemnaker, saya mendorong agar wilayah-wilayah yang membutuhkan SDM yang perlu dilatih, tadi disebutkan oleh Pak Menteri, *reskilling*, *upskilling* dan seterusnya, ya, bisa diprioritaskan. Itu satu.

Kemudian yang kedua, ternyata Pak Menteri ini juga menarik, ya, karena apa yang dilakukan oleh BPVP Bandung ini tidak hanya menyelenggarakan pelatihan *in house training* di, di balai, ya, tapi juga melayani pelatihan secara *customized* yang diajukan oleh kelompok masyarakat atau pemerintah daerah, jadi jemput bola, begitu. Nah, menurut saya ini juga satu hal yang patut diapresiasi, kenapa? Karena menurut kepala balainya, setelah efisiensi anggaran kami enggak bisa menginapkan para peserta pelatihan, begitu, ya. Nah, ini juga model yang menurut saya perlu dikembangkan. Kenapa? Karena hari ini jika memotret potensi angkatan kerja kita yang didominasi oleh Gen Z, misalnya.

Saya juga baru pulang dari Purbalingga, mungkin nanti bisa dikunjungi, nih, oleh Pak Menteri atau Pak Wamen yang sering jalan-jalan. Di sana ada sebuah perusahaan, Pak, digawangi oleh 2 orang pemuda awalnya, pada saat pandemi, dari 2020-2021. Sekarang 2025, dia sudah punya karyawan 500 orang, semuanya anak muda, kelahiran 96, 97, 2001 seperti itu, dengan menekuni *digital marketing*, Pak, seperti itu. Dan luar biasa, mereka katakan, “Kami di sini bisa membangun *self-confidence*, ya, dengan *digital marketing* itu”. Nah, menurut saya ini juga menjadi satu tantangan ini, Pak, kenapa? Karena mereka hanya berbekal *smartphone*, begitu, duduk dari pagi sampai jam 2, jam 4 sore, selain mendapatkan gaji pokok, bonusnya itu, Pak, yang lebih besar. Bonusnya itu bisa 2-3 kali lipat upah minimum, Pak, begitu. Jadi, luar biasa ini bisa menjadi salah satu *benchmarking* jika kita ingin menyelenggarakan pelatihan yang sasarannya adalah generasi muda. Itu yang kedua, Pak, yang ingin saya sampaikan.

Nah, jadi yang ketiga, bagaimana caranya, Pak, kalau kemudian tadi cita-citanya Pak Menteri ingin minimal satu provinsi, satu UPTP. Atau minimal yang sekarang baru 21, tadi juga diperjelas, nih, oleh Bu Meliyana, ya, dari kekurangan yang 6 UPTP, tapi setelah kita lihat di petanya itu yang dikasih kode 0, Pak, lebih banyak sebetulnya, 22, begitu. Nah, ini strateginya seperti apa, Pak, begitu, karena kalau kita lihat dari manfaat, ya, kehadiran BLK di balai pelatihan, khususnya di Bandung ini, menurut saya harus dialirkan, ya, energi positifnya untuk daerah, ya. Nah, itu untuk Pak Menteri.

Berikutnya untuk Ketua BNSP, ya. Saya sepakat bahwa hari ini hampir semua peluang kerja itu membutuhkan sertifikasi, ya, untuk memastikan bahwa pekerjanya bisa mendukung produktivitas, pekerjanya bisa menjadi daya ungkit dari jenis usaha atau perusahaan yang dimasuki. Nah, pertanyaan saya, Pak, dari

paparan Bapak saja, ya, yang ingin saya tanyakan, ya, mungkin nanti bisa berbagi dengan Anggota yang lain.

Yang ingin saya tanyakan, yang pertama, kesenjangan jumlah tenaga kerja dan sertifikasi. Ini disebutkan terdapat *gap* yang sangat jauh antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah yang tersertifikasi 0,78% dari angkatan kerja yang tersertifikasi. Ini masalahnya apa, Pak? Kok sampai kemudian *gap*-nya sangat jauh, begitu, padahal kita bicara pengangguran juga masih membutuhkan peluang kerja yang, apa, bersertifikat, begitu. Kemudian juga kalau kita bicara tentang lulusan, lulusan sekolah setiap tahun terus bertambah, begitu, ya. Nah ini, satu, masalahnya apa? Yang kedua, strategi atau langkah BNSP untuk memperbesar rasio atau kemudian memperkecil *gap* ini seperti apa, ya.

Kemudian yang kedua, ini masih dari paparan Bapak ini semuanya, ya, yang kedua, sebetulnya, kan, peluang pekerjaan di luar negeri ini banyak, Pak, ya, bahkan kemarin ada tagar #KaburAjaDulu, begitu, ya. Kenapa? Karena memang ternyata Kementerian Pelindungan Pekerjaan Migran Indonesia juga bekerja sama, Pak, dengan GIZ, ya, yang digawangi oleh KBRI, eh, oleh Kedutaan Besar Jerman di Indonesia, ya.

Nah, kalau kemudian di sini disebutkan peluang pekerjaan luar negeri belum sepenuhnya dilengkapi dengan deskripsi pekerjaan atau *skillset* sehingga menyulitkan dalam pengembangan skema sertifikasinya, kira-kira langkah koordinasi yang sudah dilakukan seperti apa ini oleh BNSP? Karena kita enggak bisa menunggu, Pak, jadi kalau menurut saya BNSP ini harus banyak jemput bola, ya, tadi yang terkait dengan *gap,* kemudian juga peluang pekerjaan di luar negeri, ya, sampai beberapa duta besar yang memang kebetulan kami kenal baik, begitu, banyak sebetulnya peluang kerja seperti, apa, pekerjaan formal maksud saya, ya, di Kuwait, ya, butuh tenaga perawat, begitu, tapi itu juga ternyata masih banyak, ya, yang perlu dikejar, begitu, dari dalam negeri untuk mempersiapkan pekerja-pekerja kita atau calon pekerja migran kita untuk merebut peluang kerja di luar negeri.

Yang berikutnya, terkait dengan penjaminan mutu sertifikasi yang masih lemah, ya. Di sini Bapak sebutkan masih terdapat praktik pelaksanaan sertifikasi yang belum sesuai dengan prosedur. Nah, ini pertanyaannya kenapa ini, kok, belum sesuai dengan prosedur, apakah sosialisasinya kurang, apakah kemudian pemahamannya tidak merata, begitu, ya, atau seperti apa, Pak, ini kendalanya? Dan kira-kira ini sama pertanyaannya, apa yang akan Bapak lakukan untuk bisa memperbaiki, ya, praktik-praktik yang belum sesuai dengan standar atau prosedur yang Bapak terapkan di BNSP?

Ya, itu saja mungkin, Pimpinan, yang ingin saya tanyakan. Mudah-mudahan setelah ini Anggota juga akan menanyakan dari apa yang disampaikan oleh Ketua BNSP karena banyak sekali ini yang bisa ditanyakan. Terima kasih.

Wabillahi taufik wal hidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (CHARLES HONORIS/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Baik, terima kasih, Bu Netty.

Dilanjut lagi, Pak Sahidin, silakan.

F-PAN (Ir. H. SAHIDIN):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan, beserta Anggota Komisi IX yang kami hormati, juga
Yang kami hormati Pak Menteri, Pak Wamen, Pak Dirjen serta Jajaran, juga
Yang kami hormati Pak Ketua BNSP beserta Wakil Ketua.

Tadi sudah banyak, Pak, dibahas, ya, masalah tenaga kerja ini. Sekarang ini, Pak, tenaga kerja ini, ya, ada dua. Pertama, memang dibutuhkan untuk perusahaan, atau industri, atau kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan suatu usaha. Ada lagi kebutuhan mereka untuk wiraswasta. Saya melihat, ya, hari ini, kan, yang paling diminati pelatihan ini untuk wiraswasta, Pak. Kalau BLK-BLK itu, mereka ini belum siap untuk berdiri sendiri, untuk pekerja pun tidak terima. Berapa banyak BLK melahirkan, membuat, apa, satu pelatihan, contohnya kayak *security*, tetapi perusahaan tidak datang ke BLK, Pak, tidak ambil sertifikat itu untuk mencari *security*. Pasti mencari lembaga lain untuk pelatihannya.

Dan ini, Kemnaker ini bagaimana bisa? Mereka bisa berdiri sendiri. Contoh mungkin, ya, kayak barista, Pak. Barista, buat kopi, buat kue, apa-apa, UMKM, ini langsung jadi ini. Nah, kan, tidak sama polanya antara, ya, yang kita pasok atau kita cetak untuk pabrik dengan wiraswasta ini pasti beda. Tentu dia banyak praktik, banyak apa semuanya, nah, mungkin dia punya otodidak.

Mungkin kita buat polanya, ini suatu saran saja, Pak, kita umumkan barang siapa mungkin ingin wiraswasta kami buka pelatihan ini. Nah, ini lebih menarik, Pak. Kalau ini kita latih, kita berikan ini, ya, semua kompetensi yang bagus, kita tak rugi, tak juga jadi beban negara lagi. Kenapa? Memang ini betul-betul, ya,

menjadi pekerja yang andal untuk berdiri sendiri. Mungkin tak perlu lagi pakai sertifikasi tadi. Ini yang perlu ke depan, tentu kita siapkan, Pak, modal kerjanya sekalian, tapi tidak banyak, kira-kira berapa yang harus kita berikan modal. Nah, sehingga, ya, kita putus, artinya apa? Berarti ada insentif, modal, selesai.

Yang terjadi apa sekarang ini, Pak, contohnya ternak ayam. Ayam, telur, daging, ini, kan, mereka ingin wiraswasta, tapi tidak tahu caranya, habis itu kita latih, kasih modal, mereka selesai. Nah, ini ke depan mungkin ini masukan, Pak, apa, Pak Menteri, ya, bagaimana kita bisa melatih betul-betul untuk wiraswasta.

Kedua, juga dengan Ketua BNSP, ini yang 5 juta ini, Pak, sudah berapa, Pak, yang diterima, ini, Pak? Yang, apa, yang sudah dapat sertifikasi ini. Sudah berapa yang mendapat, ya katakanlah yang sudah bekerja dari 5 juta sertifikasi ini. Ini ada data enggak, Pak? Kalau ada data mungkin tolong sebutkan.

Dari saya itu. Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (CHARLES HONORIS/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Terima kasih, Pak Sahidin.

Masih ada lagi, Bapak/Ibu Anggota? Silakan.

Bu Teti, Bu Indah Kurnia, setelah itu Pak Sihar, setelah itu baru Pak Safei, ya.

Bu Teti dulu, silakan. Iya, Bu Teti, silakan.

F-P. GOLKAR (TETI ROHATININGSIH, S.Sos.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan dan segenap Anggota Komisi IX yang saya hormati,
Pak Menaker beserta jajaran yang saya hormati,
Dari BNSP yang saya hormati.

Selamat sore, Pak.

Lagi mengantuk-ngantuknya, nih, Pak. Terima kasih dari Bapak dan dari BNSP, ini banyak sekali tantangannya, ya, Pak. Ada beberapa tantangan, 6 tantangan yang dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja ini ada 6

tantangan. Bagaimana, Pak, masalah standarisasi nasional dan internasional, bagaimana langkah konkret BNSP mengatasi tantangan pengakuan sertifikasi kompetensi secara internasional, terutama untuk PMI kita yang membutuhkan tenaga kerja perusahaan luar negeri, khususnya untuk sektor-sektor pekerja migran. Apakah sertifikasi BNSP sudah menjadi syarat utama rekrutmen PMI di negara-negara tujuan seperti Korea, Jepang, dan Timur Tengah?

Untuk integrasi vokasi dan sertifikasi, Pak, program pendidikan dan pelatihan vokasi belum sepenuhnya diakhiri dengan sertifikasi. Bagaimana BNSP dan Kemnaker mengharmonisasi sistem agar setiap pelatihan pabrik maupun swasta otomatis disertai sertifikasi kompetensi?

Dalam bidang lemahnya penjaminan mutu sertifikasi, Pak, apa langkah korektif dari BNSP terhadap praktik sertifikasi yang tidak sesuai prosedur? Bagaimana pemantauan terhadap LSP dilakukan secara konsisten, dan sejauh mana hasil *monitoring* ini digunakan sebagai dasar pencabutan lisensi atau sanksi.

Itu, Bu, Bapak. Sementara itu, terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (CHARLES HONORIS/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Terima kasih, Bu Teti.

Silakan dilanjut Ibu Indah Kurnia, silakan.

F-PDI PERJUANGAN (INDAH KURNIAWATI, S.E., M.M.):

Terima kasih, Pimpinan, Bapak/Ibu Anggota Komisi IX.

Tadinya saya pikir saya tidak melakukan pendalaman, tetapi setelah mendengar diskusi yang sangat menarik dan penting, khususnya Pak M.H. Seven.

Pak M.H. Seven, itu Muhammad Haris. Saya tambahkan Seven, Pak, ada CR Seven, di sini ada, M.H. Seven, iya. Kenapa Seven? Enggak ada yang tanya? Karena Bapak dari Salatiga, Salatiga itu dapatnya tujuh Pak. Salah tiga, jadi dapat tinggal tujuh, iya. Enggak pikir sampai sejauh itu, *ndak* apa-apa untuk *ice breaking* saja, ya, supaya sore-sore enggak tegang.

Dan *quote of this evening* dari Pak Menteri adalah "Selama kita bersama pasti bisa" iya, kan, Pak? Nah, saya mengikuti diskusi dan interaktif yang sangat menarik pada sore hari ini dan *concern* kita adalah bagaimana kita mampu untuk

mencapai SDM yang bukan hanya kompeten, *profesionalism*, tapi juga berdaya saing. Nah, dari apa yang disampaikan tadi, di sini ada PR atau tantangan, lah, kita sebut sebagai tantangan, yang perlu dijawab meskipun tantangannya menurut saya sangat besar dan substantif, dan Bapak tadi, Pak Menteri menyampaikan di halaman 9, urgensi, urgensi itu, kan, sesuatu yang *urgent*, ya, Pak, ya, tiap provinsi memiliki minimal satu, tapi, kan, kenyataannya tidak seperti itu. Jadi, tantangannya adalah belum, sebarannya, sebaran balai belum ideal.

Kemudian, belum terpenuhinya infrastruktur dan instruktur, penting sekali, sangat substantif. Terus kemudian, belum lagi kebutuhan untuk memastikan tidak adanya, bukan tidak, adanya *match and link*, *match and link* dengan dunia industri, khususnya yang masa depan, yang saat ini pakai AI dan lain-lain sebagainya, ya, Pak, ya. Meskipun dalam praktiknya, saya, Pak, di Surabaya, Dapil saya, itu saya berhadapan langsung dengan tenaga kerja yang *expert*. Ini dia memberikan penerimaan negara yang cukup signifikan, yaitu pelinting rokok, Pak, dan satu lagi yang mendunia di Surabaya adalah pabrik emas, ada tiga besar pemain dunia di Surabaya. Itu mereka *skillfull* karena mereka bekerja puluhan tahun.

Nah, kalau nanti misalnya sertifikasi menimpa mereka, yang melakukan sertifikasi atau pengujinya kemampuannya di bawah taraf, saya enggak, saya enggak sepakat kalau mereka dipanggil buruh. Karena mereka *skillfull*, Pak, meskipun ijazahnya mungkin SD pun mereka enggak pegang ijazah, tapi mereka bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai sarjana. 25 tahun bekerja dengan penghasilan yang sangat baik, mereka melinting rokok. Satu menit dapat bagus, begitu, Pak, sementara saya dengan Pak Askolani waktu itu sampai bermenit-menit satu pun masih enggak presisi.

Nah, artinya termasuk pengukir emas itu, Pak, perhiasan emas itu. Itu mereka saya anggap sebagai artis itu, apa, seniman yang tidak mudah itu. Kalau mereka pergi ke Italia, ke Hongkong, pasti lebih tinggi itu apresiasinya. Nah, hal-hal seperti itu menjadi perhatian kita bersama agar jangan sampai terjadi pada saat dilaksanakan sertifikasi, instruktur kemampuannya jauh di bawah dari yang di, dari calon yang mendapatkan sertifikasi yang hanya norma formalitas saja, kan, dapat itu, begitu. Jadi, mungkin juga harus diperhatikan sehingga tidak sampai mereka kehilangan respek, Pak, hanya karena “Tahu apa, sih, lu?” begitu, kan, yang di, yang disertifikasi ini. Jadi, sertifikasi itu perlu juga dipikirkan seperti itu.

Nah, untuk yang, apa tadi namanya, BNSP, itu saya lihat di halaman 2, Mutual Recognition Agreement atau pengakuan kompetensi antar negara atau lembaga. Nah itu MRA, kerja sama internasional BNSP yang telah dijalin dengan pihak luar negeri, ya, selama ini. Saya ingin tahu saja sejauh mana *outcome* terhadap *certify* tenaga kerja kita yang sudah tersertifikasi itu, apakah sudah dapat

diukur dampaknya terhadap target yang diharapkan? Jadi, tadi *professionalism*, kompeten, dan berdaya saing.

Nah, kemudian satu lagi PR-nya kalau kita bicara lebih besar lagi dengan poin, poinnya yang lebih dalam lagi pertanyaan yang harus dijawab adalah setelah mereka tersertifikasi apakah ada jaminan, ada perusahaan, tempat mereka berlabuh untuk berkarya, itu tak kalah pentingnya.

Dari saya itu, Pimpinan. Terima kasih.

KETUA RAPAT (CHARLES HONORIS/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Terima kasih, Bu Indah.

Kita lanjut, Pak Sihar Sitorus. Silakan.

F-PDI PERJUANGAN (Dr. SIHAR P.H. SITORUS, B.S., B.A., M.B.A.):

Baik, terima kasih, Pimpinan.

Pimpinan yang saya hormati,
Pak Menteri, Pak Wakil Menteri, Pak Ketua BNSP, dan Ibu Wakil Ketua BNSP, dan seluruh Jajaran yang saya hormati.

Ini saya agak tertarik dengan *slide* 13 dari Pak, Pak Menteri terkait dengan proyek *based learning* berskala nasional itu. Memang kalau kita melihat dari dunia Ketenagakerjaan, kan, Pak, ya, kita bisa melihat suatu tren kalau UMR itu, kan, naik terus, tuh, Pak, kalau tren nih, Pak, dari tahun ke tahun pasti naik, bahkan kenaikannya lebih tinggi daripada inflasi itu sendiri. Nah, dengan adanya kompetensi, harapannya, kan, tentunya terjustifikasi, lah, kenaikan daripada gaji tersebut.

Nah, namun dalam tataran praktis, ini saya juga dapatkan data, lah, ya, dari hasil kunjungan ke Dapil. Kebetulan saya beberapa minggu yang lalu saya kunjungan ke Mandailing Natal bagian selatan daripada Sumatera Utara. Saya mampir ke UPTD BLK Panyabungan. Nah, di sini ada 2 hal yang saya temukan. Satu, ada peralatan yang sangat bagus, tapi enggak pernah terpakai, Pak, sudah 5 tahun apa 10 tahun, alat mengelas bagus, enggak pernah terpakai. Kemudian, kedua, gedungnya katanya masih Dinas Pengairan Sumatera Utara, dan itu bayar. Dan itu akhirnya telur dan ayam, nih, mau bagaimana, kan, begitu, ini kira-kira, itu salah satu tantangan yang saya ceritakan, ini adalah salah satu tantangan yang akan Bapak hadapi. Dan ini menjadi mubazir, sayang sekali. Padahal potensi ada,

lokasinya bagus banget, malah saya pikirnya waktu mampir, “Enak juga, kali, ngantor di sini, nih, adem, angin, begitu, ya, menyegarkan, begitu”.

Nah, dalam hal balik ke konteks tadi, *project-based learning* berskala nasional tadi. Nah, jadi ada satu yang lama, dengan berbagai macam variasi di berbagai provinsi, kabupaten, mungkin dengan, dengan ini-nya sendiri, ya, tantangannya sendiri. Kemudian, ada *project-based learning* yang kita mau relevan, *relatable* dengan anak-anak hari ini. Jadi, dua tantangan lama masih ada, aturannya juga tentang ini alat mau diapakan dan gedungnya bagaimana, renovasi itu menjadi tantangan. Kemudian, datang tantangan baru, kebutuhan hari ini, dan tentu di tengah ini ada transisi, nih, Pak. Nah, yang kita ingin lihat juga nanti, Pak, adalah *roadmap* daripada ini, nih, dari perjalanan dari lama ke baru. Karena ini akan sangat, sangat, sangat penting.

Kedua adalah sedikit berkaitan yang disampaikan Ibu Indah tadi, bahwa karena kita begitu seringnya melakukan satu pekerjaan menjadi suatu keahlian tersendiri, menjadi ahli. Nah, kemudian kita memikirkan juga bagaimana dengan cara-cara yang lebih, apakah memungkinkan kesetaraan misalnya, untuk itu tadi, daripada dia mengikuti sertifikasi.

Oh, mungkin ini tadi geser, tanpa sadar saya harus geser ke BNSP.

Sudah ahli, kemudian, tapi harus ada sertifikasi, tapi ini orang sudah ahli, apakah harus dia mengikutinya, bisa enggak kesetaraan, kan, begitu, ya? Karena dia ibarat kita mengajari bebek berenang, begitu, jadi untuk dapat cap dia bebek padahal, nih, kita lihat dia jago, jago, jago berenang. Nah, ini akan menjadi tantangan dan ini kita percepatan kembali kepada bahwa kita ingin tenaga atau pekerja itu adalah yang memiliki kompetensi sehingga bisa memberikan nilai tambah. Nah, ini ada suatu *balancing act* yang harus dijaga di antara biaya dan, dan pendapatan.

Dan, nah, kemudian tadi, ya, disampaikan kawan, rekan kami juga bahwa dengan anggaran yang besar ternyata serapan masih kecil. Padahal kita banyak juga institusi-institusi lain yang bisa kita manfaatkan untuk menyerap tenaga kerja tersebut, misalnya, misalnya melalui universitas, Pak. Misalnya mereka yang sudah tahun keempat yang kira-kira nanti sebentar lagi akan lulus, nah mungkin itu ada suatu program yang bisa dilimpahkan juga ke sana sehingga mempercepat mereka mendapatkan peluang, mendapatkan pekerjaan.

Mungkin itu dari saya pada sore hari ini. Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (CHARLES HONORIS/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Ya, terima kasih, Pak Sihar.

Silakan selanjutnya, Pak Safei.

F-PDI PERJUANGAN (H. AHMAD SAFEI, S.H., M.H.):

Baik, mohon izin, Pimpinan.

Teman-teman Anggota Komisi IX, Pak Menteri, Pak Wamen, Pak Ketua BNSP, seluruh Jajaran, Staf Ahli yang sempat hadir.

Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa memang kompetensi itu menjadi keharusan bagi setiap pekerja dan perusahaan. Karena kalau pekerjanya saja yang berkompetensi kemudian perusahaannya tidak berkompetensi juga ini akan jadi masalah. Jadi, pekerja dan perusahaan berkompetensi, dan itu harus menjadi sebuah keharusan, saya kira. Oleh itu memang, semua pengusaha, semua perusahaan, sangat mengharapkan utamanya tenaga kerja, sangat berharap bahwa kehadiran BNSP ini sebagai sebuah lembaga penguji itu bisa hadir di, sampai ke pelosok untuk memudahkan kegiatan ini karena kalau tidak hadir ini menyulitkan.

Saya baru pulang keliling-keliling di Sulawesi Tenggara, Pak, dengan Pak Wamen, melihat salah satu proyek strategis nasional di sana, sebuah kawasan industri yang saya kira luar biasa. Kawasan industri ini akan menjadi kawasan industri kelas dunia yang diperkirakan akan menyerap tenaga mungkin sampai 150.000 orang, ini dalam perjalanannya. Saya kira banyak hal yang kita bisa lihat di situ dan ini sekarang sedang berjalan, Pak. Oleh itu, olehnya itu saya sangat berharap bahwa dengan kehadiran BNSP ini bisa hadir tuan rumahnya di daerah-daerah karena se-Sulawesi Tenggara juga hadir, Pak, se-Sulawesi Tenggara lembaga penguji harus punya begini tidak ada, se-Sultra, lho, itu sepengetahuan saya, ya.

Kita bisa membayangkan, begitu banyaknya orang yang membutuhkan kompetensi ini, tapi kemudian tidak ada lembaga itu. Nah sehingga kalau ada yang mau menguji, itu didatangkan, Pak, dari Jakarta atau dari Makassar, paling tidak. Itu biayanya berapa? Banyak biaya. Contohnya begini, seorang operator alat berat yang sudah bawa alat berat ini berpuluh-puluh tahun, tapi ketika ingin kerja, itu diwajibkan oleh perusahaannya harus ada SIO, Surat Izin Operasi, yang dikeluarkan oleh lembaga itu. Nah, karena tidak ada pengujinya di situ, maka harus didatangkan dari luar Sulawesi Tenggara. Biayanya berapa? Dan mereka tidak mungkin datang kalau hanya satu orang, biayanya antara 5-7 juta. Kita bisa

membayangkan orang yang belum punya kerja, belum bekerja, tapi harus menyediakan uang 5-7 juta untuk bisa mendapatkan sertifikasi untuk bisa menjadi persyaratan, menjadi pekerja di tempat itu.

Nah ini, ini, oleh itu saya berharap, Pak, paling tidak kalau Bapak secara, apa, kelembagaan tidak bisa hadir, paling tidak bisa bekerja sama, diberikan kewenangan kepada BLK-BLK yang ada di daerah, supaya BLK-BLK ini bisa berdaya. Ya, diberi kewenangan saja. Karena kalau kami lihat juga, karena kami beberapa kali mengikuti juga, justru lebih hebat pengetahuannya sebenarnya, orang yang dilatih daripada pelatihnya. Ya, ini kejadian, Pak. Jadi, yang datang melatih itu justru lebih hebat. Ini orang sudah berpuluh-puluh tahun sudah jadi operator. Kamu yang hanya karena pengetahuan apa, datang mau menguji dia, lebih hebat orang ini. Jadi, sebenarnya tinggal dibutuhkan, tinggal stempel, Pak, ya, tinggal stempel dari Bapak, bahwa orang ini berat. Nah, olehnya itu kita berharap paling tidak bisa bekerja sama dengan BLK-BLK yang ada di daerah, ya.

Kemudian kedua, Pak Menteri, saya kira di daerah banyak juga BLK-BLK yang sudah mumpuni, sudah maju, sudah apa. Lalu yaitu kekurangan-kekurangan BLK yang dimiliki oleh kementerian sendiri, saya kira tidak perlu kementerian membangun BLK lagi. Kerja samakan saja dengan BLK yang ada di daerah, yang sudah mumpuni, tinggal kita melihat, BLK ini sudah ada di situ, kira-kira kekurangannya apa? Rata-rata kekurangannya cuma dua, Pak Menteri. Yang pertama itu memang instruktur, yang berikutnya adalah peralatan. Jadi, tidak perlu membangun, tidak perlu menyediakan lahan, membangun gedung, membangun apa, tidak perlu lagi. Tinggal kita lihat saja, kita evaluasi, ini kabupaten, ini kota, ada BLK-nya *ndak*, kalau ada BLK-nya kita lihat BLK-nya kekurangannya apa sehingga tidak bisa berjalan seperti apa adanya.

Nah, ini yang kita harapkan, Pak Menteri, sehingga mungkin bisa lebih efisien kalau ini kita bangun. Saya kira ini dua hal, Pak Menteri, ya, yang saya dapat sampaikan. Dan salam hormat saya untuk Pak Wamen, luar biasa, kita bisa berjalan sampai ke mana-mana, itu, Pak. Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (CHARLES HONORIS/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Ya, terima kasih, Pak Safei.

Ini masih ada dua lagi dari Anggota yang mendaftar. Selanjutnya Pak Asep Romy Romaya dan *stand by* Bu Rahmawati Herdian.

Silakan, Pak Asep.

F-PKB (H. ASEP ROMY ROMAYA, S.E.):

Terima kasih.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi IX beserta Teman-teman Anggota Komisi IX yang saya cintai,
Yang saya hormati Kementerian Ketenagakerjaan serta Sekretaris Jenderal, beserta Pak Wamen, terus para Jajaran,
Ketua BNSP beserta Jajaran.

Izin, setelah saya turun ke lapangan, reses, ada mungkin kelompok-kelompok masyarakat yang datang ke saya terkait para penghasil kopi. Mereka minta bantuan seolah kami ini sebagai wakil rakyat, terkait akses jalan ke pusat tani. Dan termasuk mungkin BNSP sebagai independen, mungkin ini sebagai masukan, kenapa saya perlu sampaikan ini, mungkin bisa ada solusinya untuk membantu masyarakat yang dampaknya bisa puluhan ribu orang.

Contohnya, ketika pulang dari hutan itu mereka membawa 10-20 kilo kopi, Pak, itu mereka bisa langsung dicairkan ke koperasi. Kendalanya terkait akses, biasanya di pundak, dipikul, atau lebih, kalau lebih itunya pakai motor yang pakai rantai itu, Pak, ke lokasi itu membawa hasil tani itu. Makanya mereka minta bantuan ke saya, maka saya turunkan alat berat, Pak, alat berat saya pribadi, begitu. Kenapa? Ini sangat bermanfaat sekali, terkait bisa mengurangi masa pengangguran. Karena mereka uletnya menghasilkan kopi, bahkan ada tumpang sarinya, ada cabai, dan yang lainnya.

Untuk itu, mungkin kalau Bapak menyiapkan untuk BLK-BLK. Tapi, saran pandang saya karena mereka ada kemauan terkait hasil tani, mungkin kita harus sangat dorong, didorong. Tapi, kendalanya, itu, kan, harus ada izin dari Perhutani, Pak. Tapi, saya mau dibantukan turunkan alat berat itu, jangan sampai bersangkutan dengan itu, intinya.

Kalau untuk menanam kopi, terus sampai ada alpukat juga, mungkin saya menyampaikan ini Bapak bisa membantu solusi-solusi untuk para petani itu yang menghasilkan sampai ribuan ton, Pak, itu hasil kopinya. Di satu kecamatan itu sampai lima desa itu penghasil kopi, maka saya sampai menurunkan alat berat sendiri untuk membantu masyarakat itu, Pak.

Mungkin saya menyampaikan ini, ada solusinya membantu ketika Bapak membikin BLK, tapi ini sudah siap, ya ini sudah siap, tapi mereka perlu bantuan untuk usahakan ini sampai menghasilkan kopi robusta, arabika itu, Pak.

Mungkin dari saya sekian, Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (CHARLES HONORIS/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Ya, terima kasih, Pak Asep.

Silakan dilanjut, Ibu Rahmawati Herdian.

F-P. NASDEM (RAHMAWATI HERDIAN, S.H., M.Kn.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi IX dan juga seluruh Anggota Komisi IX, dan
Yang saya hormati Bapak Menteri dan Bapak Wamen Ketenagakerjaan dan seluruh Jajarannya,
Yang saya hormati Bapak Ketua BNSP dan juga seluruh Jajarannya.

Pak Menteri, seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini kita mengalami persoalan yang luar biasa, salah satunya ialah masih tinggi angka pengangguran di Indonesia yakni 4,78% atau 7,28 juta orang per Februari 2025. Dan prediksi dari IMF di akhir tahun 2025 ini akan meningkat menjadi 5%. Penyebabnya sangat bervariasi, mulai dari kesulitan lapangan pekerjaan yang didapatkan dan juga SDM terampil yang minim dan tidak sesuai dengan kebutuhan pasar industri, maka menurut saya program BLK ini sesungguhnya menjadi salah satu upaya dalam mengurangi angka pengangguran yang ada saat ini.

Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Menteri, bagaimana strategi Kementerian Ketenagakerjaan dalam memastikan sinergi yang efektif antara Balai Latihan Kerja dengan dunia usaha dan dunia industri, agar kurikulum dan materi pelatihan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja saat ini dan masa depan. Karena sinergi antara program ini dengan dunia usaha menjadi penting, agar *output* pelatihan ini benar-benar dapat diserap oleh dunia usaha, tidak hanya sebatas formalitas saja dalam penyelenggaraan pelatihan.

Mungkin itu saja, Pimpinan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (CHARLES HONORIS/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Baik, terima kasih, Ibu Rahmawati.

Dari anggota sudah cukup, Bapak/Ibu?

F-PDI PERJUANGAN (INDAH KURNIAWATI, S.E., M.M.):

Boleh sedikit, Pimpinan?

KETUA RAPAT (CHARLES HONORIS/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Iya, Bu Indah.

F-PDI PERJUANGAN (INDAH KURNIAWATI, S.E., M.M.):

Ini sebelum Pimpinan, ya.

Pak Menteri dan juga Kepala BNSP yang saya hormati.

Mungkin juga dipikirkan ke depannya, seandainya program ini berhasil, ya, Pak, ya. Untuk transformasi *project-based learning* berskala nasional dan kemudian apa yang dilakukan oleh BNSP untuk sertifikasi semua berhasil. Itu ada *excess*. Itu kalau misalnya benar-benar tenaga itu, *qualified*, satu orang mampu mengerjakan tugas dari dua orang misalnya, maka di tempat itu akan ada surplus pegawai. Mereka-mereka yang dianggap tidak mampu *reskill* dan *upskill,* maka mereka akan kemungkinan dilepas seperti itu. Maka mungkin bisa dibikinkan *exit policy*, sama seperti beberapa perusahaan besar di Dapil saya, misalnya. Mereka membuka peluang untuk *golden shake hand* dengan pemutusan hubungan kerja awal. Dengan memberikan pelatihan-pelatihan UMKM sehingga pada saat program itu di-*offering,* mereka yang keluar, mereka sudah siap untuk bersolo karier, artinya *entrepreneurship*-nya dibangun. Mungkin masukan saja untuk apabila program ini benar-benar berhasil.

Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT (CHARLES HONORIS/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Ya, terima kasih, Bu Indah.

Dari meja Pimpinan, Ibu Putih, silakan.

F-P. GERINDRA (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX):

Ya, sedikit saja, Pimpinan.

Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi IX yang saya hormati,
Kementerian Ketenagakerjaan beserta seluruh Jajaran,
Dari BNSP, ya, beserta seluruh Jajaran.

Tadi sudah banyak, lah, saya kira, prinsipnya terkait dengan balai latihan kerja memang kita, ya, perlu revitalisasi, bahasanya, begitu, ya, ini bahasa yang cukup lama sebenarnya, revitalisasi baik infrastruktur maupun juga instruktur, ya, ini yang sebenarnya masalah klasik, tapi masih terus menjadi tantangan hari ini terkait keberadaan Balai Latihan Kerja, termasuk tentunya juga *link and match*-nya dengan dunia industri. Tadi sudah banyak juga, saya kira kami juga turut mendorong bahwa, ya Kementerian Ketenagakerjaan bisa lebih memberikan jaminan bahwa setiap pelatihan memang ini harusnya bisa berbasis, apa tadi, *project-based learning*, begitu, ya, yang bisa benar-benar sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja lokal maupun juga industri strategis nasional kita, ya, yang hari ini, kan, saya kira cukup banyak dikembangkan.

Yang selanjutnya terkait dengan sertifikasi yang saya kira cukup penting, ya. Tadi masalah ketimpangan bagaimana akses sertifikasi, ya, saya kira perlu BNSP dan juga Kementerian Tenaga Kerja ini untuk bisa mengatasi, ya keterbatasan dari tempat uji kompetensi, ya, untuk termasuk juga asesor di berbagai kabupaten/kota yang ada. Dan juga penting juga bagaimana percepatan rekomendasi terkait dengan pembuatan Lembaga Sertifikasi Profesi dari balai latihan kerja, nih, ya, balai-balai latihan kerja. Apakah dia milik pemerintah maupun juga yang lembaga pelatihan yang memang swasta hari ini, ya, untuk bisa mendukung percepatan sertifikasi pada peserta pelatihan.

Karena beberapa kami kunjungan kerja ke balai latihan kerja, ya, Komisi IX secara langsung itu juga mendapatkan keluhan yang sama. Keluhan ini juga disampaikan oleh beberapa BLK, bahkan banyak peserta yang mau tidak mau akhirnya untuk bisa mendapatkan sertifikasi itu lompat provinsi, begitu, ya, BLK-nya di mana, untuk bisa mendapatkan sertifikasinya harus ke provinsi yang lain. Ini pasti secara biaya juga menjadi tinggi, begitu, ya.

Jadi, saya kira penting untuk, ya, BLK ini bisa melakukan sertifikasi, lah, begitu, kalau bisa, ya, untuk bisa memenuhi syarat menjadi LSP. Dan juga, ya perlu ada dorongan, saya kira, untuk regulasi dari Kementerian Tenaga Kerja, bagaimana memperkuat komitmen pengakuan sertifikasi, ya, dan juga pelatihan, ya, sebagai syarat kerja di semua sektor usaha. Karena memang, kan, selama ini ada yang disertifikasi di BNSP, begitu, ya, tapi itu tentu enggak semuanya juga

dibutuhkan di dunia kerja, yang sebaliknya dibutuhkan di dunia kerja, tapi tidak diwajibkan pada tenaga kerja.

Saya kira itu saja tambahannya, Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT (CHARLES HONORIS/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Terima kasih, Ibu Putih.

Bapak/Ibu.

Tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Anggota dan Pimpinan Komisi IX, saya hanya ingin menambahkan sedikit sebetulnya. Saya ingat, teringat, Pak Menteri, dalam beberapa minggu yang lalu kita mendapatkan data terkait dengan klaim JKP yang saat ini jumlahnya sudah hampir sama dengan data klaim JKP di tahun 2024, ya. Ini artinya apa? Artinya angka PHK-nya tinggi, Pak, sekarang, Pak. Di bulan April itu sudah 52 sekian ribu, tadi sempat saya catat, di tahun 2024 dalam saat itu sudah angkanya 57 ribu, ya. Artinya mungkin di bulan Juni saya rasa bisa saja sudah melebihi di tahun 2024 sehingga kalau bicara jujur memang angka PHK-nya tinggi, Pak.

Pertanyaan saya, pelatihan vokasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan ini sudah didesain belum, untuk bagaimana kita menanggulangi PHK lebih banyak, atau me, apa ya, me-*reskill* teman-teman yang terkena PHK untuk bisa secepatnya kembali mendapatkan pekerjaan. Apalagi tipologi pekerjaan saat ini, kalau kita lihat dengan adanya penggunaan *artificial intelligence*, penggunaan teknologi digital yang lebih intens dibandingkan sebelumnya, ini, kan, sudah berubah tipologinya. Jadi, pemerintah harus fokus bahwa Balai Latihan Kerja yang dikelola ke depan ini harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan pasar saat ini.

Karena kalau tidak dilakukan, waduh, ini ke depan bahaya sekali, Pak, yang katanya kita akan mendapatkan bonus demografi, malah menjadi mimpi buruk demografi, Pak. Kita akan punya jumlah angkatan kerja yang jumlahnya banyak sekali, tapi enggak siap bekerja, Pak, dengan tuntutan zaman saat ini. Jadi, pesan saya, tolong difokuskan bahwa pelatihan vokasi buat anak-anak muda kita ke depan ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan zaman.

Yang kedua, terkait dengan sertifikasi, Pak, ini kalau bicara saya baru, mohon maaf, saya baru tahu juga hari ini bahwa balai latihan kerja yang ada saat ini mayoritas belum tersambung dengan sertifikasi. Ya, tadi kalau diceritakan Ibu Putih barusan, bahkan dari satu provinsi harus menyeberang ke provinsi lain untuk bisa ikut tes sertifikasi. Nah, ini solusinya seperti apa, Pak? Harapan kami tentunya

semua pekerja yang ada di Indonesia bisa tersertifikasi. Kalau kita lihat angkanya ini menyedihkan, sih, Pak, dari jumlah angkatan kerja yang ada, yang tersertifikasi hanya 0,78%. Bagaimana kita bisa bersaing, angkatan kerja kita bisa bersaing, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan angka seperti ini.

Belum lagi kalau kita bicara internasional, saya jujur belum punya informasi, tapi mohon nanti dijelaskan. Seberapa kita diakui, ya, sertifikasi dari BNSP diakui di dunia internasional. Karena kalau memang diakui oleh banyak negara dengan standar yang baik, ini berita bagus buat kita, Pak, ya. Kita bukannya ingin, apa, mendorong orang harus bekerja ke luar negeri, tetapi apabila peluang kerjanya ada, kenapa tidak? Khususnya bagi pekerja yang bekerja sebagai pekerja profesional, pekerja-pekerja *skilled worker*, begitu. Jadi, kita berharap BNSP juga bisa membantu agar kita bisa mendorong lebih banyak Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri, khususnya di bidang-bidang *skilled worke*r.

Nah selanjutnya, ini jujur, ya, karena ini pertama kali Komisi IX rapat dengan BNSP, saya sama sekali enggak tahu banyak, nih, soal lembaga ini. Bapak ini mitranya ada enggak, Pak, di DPR, Pak? Dan anggarannya sebenarnya dari siapa, sih, kok, bisa ada lembaga ini, tapi enggak punya mitra di DPR? Apalagi kalau saya baca di aturan, lembaga ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Jadi, kalau misalnya belum ada mitranya, ya nanti kita usulkan, Pak, supaya Bapak bisa sering kita panggil untuk kita evaluasi di sini, Pak. Begitu, ya.

Terima kasih. Itu saja pertanyaan dan pendalaman dari kami, Komisi IX, mohon dijawab. Kami persilakan terlebih dahulu, Pak Menteri Kesehatan dan dilanjut Bapak Ketua BNSP. Silakan.

Eh, mohon maaf, Menteri Ketenagakerjaan, dan dilanjut oleh Pak Ketua BNSP. Silakan.

MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Prof. YASSIERLI, S.T., M.T., Ph.D.):

Ya, terima kasih Pak Ketua, Bapak dan Ibu Pimpinan Komisi IX, Bapak/Ibu Anggota Komisi IX.

Pertama sekali, terima kasih banyak atas masukan, kemudian *feedback.* Beberapa hal saya mohon izin dijawab secara umum, Pak Ketua, nanti detailnya mungkin kita menyusul, ya. Tapi yang terakhir saya setuju, Pak, jadi sebenarnya BNSP ini memang, apa, ya, lembaga konstruktural, tapi anggarannya memang melalui kami, Pak, Kemnaker, ya. Tapi saya setuju tadi Pak Ketua menyampaikan, dijelaskan saja statusnya jadi Mitra Komisi IX, jadi bisa dipanggil setiap saat, ya, sama-sama kita, ya, membesarkan BNSP, ya, Pak Ketua, ya.

Jadi, memang banyak hal, saya setuju dengan Bu Putih tadi revitalisasi BLK ini klasik, ya. Jadi, kami melihat dua isu, yang pertama itu adalah efektivitas keberadaan BLK yang ada di daerah UPTD. Jadi, kami melihat di situlah esensi bahwa di setiap provinsi tetap minimal harus ada satu, Pak Safei, UPTP. Merekalah yang akan menjadi perpanjang tanganan kementerian dalam melakukan pembinaan. Jadi, tetap minimal harus ada satu dan di situlah kami memiliki jangkauan, mereka bisa menjadi contoh, kemudian mereka bisa kemudian tempat pelatihan instruktur-instruktur yang dari UPTD, mereka juga kemudian bisa, ya, banyak melakukan kerja sama dengan, apa, UPTD dengan kami di, apa, UPTP. Itu esensi salah satu yang dari sekian kami sampaikan tadi bahwa memang minimal kita harus ada satu.

Yang kedua, tadi ada beberapa hal terkait tentang infrastruktur, instruktur, memang itu yang sedang kita hadapi saat ini, Pak Nurhadi, tapi *good news*-nya Bapak dan Ibu juga tahu bahwa kita punya program LISTRAF yang didanai oleh Bank Dunia. Tahun ini kita baru persiapan untuk pengadaan dan tahun depan itu kami butuh dukungan dari Komisi IX nanti terkait dengan *approval*-nya.

Untuk program LISTRAF ini sendiri nanti akan besar, Pak, jadi akan direnovasi 22 Satpel, ya, 22 Satpel nanti, ya, 22 di 16 provinsi. Jadi, terkait dengan infrastruktur, kami berharap dua tahun, ya, dua tahun, ya, Pak Dirjen, ya, 2026-2027 kita bisa beres terkait dengan infrastruktur, minimal 1, ya. Jadi, *journey*-nya itu adalah pra-Satpel, Satpel, dan kemudian itu yang kita jadikan sebagai UPTP kami, begitu, ya. Dan jadi *insya Allah* 2027 ini kita secara, apa, jangkauan kita sudah memiliki di semua provinsi.

Memang UPTD, memang ini menjadi PR, ya, walaupun tadi saya setuju tidak semua UPTD itu bermasalah sebenarnya, ada yang bagus, ya, sangat tergantung dari kebijakan dari masing-masing bupati dan wali kota, ya, kepala daerah masing-masing terkait penganggaran, ya, dan beberapa memang terbengkalai, Pak. Nah, ini yang nanti kita, kalau aset, kan, itu milik pemerintah daerah, ya.

Strategi kami apa, yang pertama kita bisa memberi bantuan terkait tentang peralatan. Ya, tentu juga bertahap, ya, tergantung *approval* penganggaran dari Komisi IX juga, dan yang kedua kita bekerja sama dengan industri. Jadi, kami mendorong industri untuk, ya, memberikan bantuan peralatan kepada balai-balai kami yang ada. Itu yang pertama.

Yang kedua, Pak, revitalisasi yang Bu Putih sampaikan dan juga Pak Charles tadi memang terkait dengan kurikulum. Jadi, kalau *slide* kami tadi terkait tentang PBL, itulah kira-kira titik temunya, Pak Charles. Jadi, kita mencoba konten yang boleh kalau dimunculkan, ya, *project-based learning* skala nasional, secara

konten ini sudah cocok dengan kebutuhan milenial. Dan secara konten juga sebenarnya sudah cocok untuk kebutuhan industri saat ini. Tapi, memang instrukturnya masih terbatas. Jadi, saat ini sedang berjalan ToT, *training of trainers*, ya, kepada 280 instruktur kami, kita fokus yang ToT ini dua, *smart operation* dan *smart creative IT skills*, ya. Ini yang secara konten kita berharap ini juga dibutuhkan oleh industri sehingga mereka bisa diterima dalam konteks *apprenticeship*, begitu, ya. Magang, tapi bukan magang membebankan industri, tapi dia hadir, makanya kita sebut dengan *project-based learning*.

Agroforestry sendiri, ini nanti kita melihat pemanfaatan hutan sosial, kita kerja sama dengan Kementerian Kehutanan. Ini juga menjadi satu terobosan dan *Green Jobs* ini juga menjadi terobosan. Jadi, secara konten, inilah *journey* yang kita harap, ya, bisa kemudian menjawab tadi sejauh mana pelatihan kita itu relevan sesuai dengan kebutuhan industri dan keinginan milenial. Tadi Pak, ya, Haris juga menyampaikan, ya, dan menurut kami kontennya di sini cukup bergengsi, Pak, begitu, ya, *content creator* di situ, ya, *graphic design*, *video editing, illustration, copywriting*, optimalisasi media, web, dan seterusnya. Tinggal, ya, kalau kontennya baru, instrukturnya yang kemudian juga harus, ya, kita sertifikasi terlebih dahulu sehingga mereka siap untuk menjadi instruktur.

Dan yang ini juga kemudian kita berharap beberapa lulusan pelatihan ini mereka juga bisa wirausaha sendiri sebenarnya. Jadi, tidak semuanya itu kemudian mereka harus bekerja di industri dan seterusnya. Inilah gambaran desain kami. Jadi, bagaimana kita tadi memastikan provinsi memiliki BLK secara konten kita siapkan, dan kemudian nanti sertifikasi mengikuti. Jadi, kami dengan BNSP kita, ya, karena kita anggarannya Kemnaker, BNSP juga, ya, mungkin dalam koordinasi Kemnaker, mungkin begitu bahasanya, ya, sehingga kita juga bisa me, apa, memberikan saran, menitipkan bagaimana arah-arah sertifikasinya juga seperti apa.

Termasuk sebenarnya, Bapak dan Ibu, skema SKKNI, KKNI yang akan disertifikasikan itu sebenarnya melalui Kemnaker sebenarnya, begitu, ya. Dan itu disusun melalui satu tim antara Kemnaker dengan Asosiasi Profesi. Ya itulah gambaran polanya, Bu Meli, ini gambarannya, begitu, ya. Jadi, seperti itu.

Dan PR kita yang ketiga sebenarnya terkait tentang skala, *scale up*-nya seperti apa. Jadi, 1 juta itu *very-very optimist* sebenarnya, padahal tahun lalu itu ini menjawab, ya, dari Pak Zainul juga, yang di bawah kami itu 128.000 kita latih, kemudian yang disertifikasi 116.000, yang terdata sudah penempatan sekitar 80.000, Pak. Jadi, efektivitas sekitar 70%, lah, itu gambarannya, ya.

Karena memang kalau Bapak-bapak lihat sebenarnya, Bapak dan Ibu lihat, beberapa balai yang UPTP itu secara fasilitas infrastruktur bagus sebenarnya,

yang UPTP, Pak. Isunya nanti adalah *scale*, apakah 150.000 atau total nanti dengan UPTD baru 400.000 itu cukup enggak, untuk menjawab tadi, kebutuhan penambahan angkatan kerja kita 1 tahun sekitar 3 juta orang. Jadi, memang ini *issue*.

Strategi kami apa? Yang pertama *hybrid*, kita berusaha modul-modul itu sebagian itu *online* sehingga yang awalnya pelatihan itu 2 bulan *offline*, mungkin cukup 1 bulan *offline*-nya, 1 bulan *online*. Nah, ini sedang kami siapkan modul *online*-nya. Sekaligus regulasi, jadi selama ini, Bapak dan Ibu, saya juga ingin menyampaikan, daya tarik pelatihan itu adalah karena diberi uang saku dan *transport,* ya. Nah, ini juga, ya, kita berusaha nanti mencoba merevisi, apakah itu bisa kemudian kita buat lebih efisien.

Dan yang terakhir, yang kami lakukan sekarang ketika efisiensi, kami membuka pelatihan itu gratis, gratis, ya, tapi, ya, tanpa konsumsi dan juga tanpa *transport*, begitu, ya, tapi gratis. Selama ini juga gratis, tapi kami buka karena anggaran kita memang terbatas, jadi instruktur *available*, fasilitas *available*, operasionalnya enggak ada, jadi kita buka kelas-kelas yang kemudian, ya, silakan, tapi khusus kelas ini tidak ada uang *transport* dan tidak ada konsumsi, itulah gambaran. Dan *alhamdulillah*, Pak Dirjen, itu berjalan, ya, berjalan dengan baik.

Baik, saya akan cepat, Pak Zainul tadi terima kasih. Kesiapan SDM memang, Pak, tapi isunya *scaling*, ya. Ini yang kita bagaimana kita angkanya, 1 juta itu ambisi, saya mau membayangkan ketika kita bisa mengorkestra itu semua sampai ke UPTD, begitu, ya, itu gambarannya dan ini akan menjadi tentangan kita.

Pak Haris, ya, tadi sebagian sudah kami sampaikan, optimalisasinya itu dengan membuat *hybrid* itu menjadi salah satu solusi, Pak. Kemudian Bu Meli, ya, pola hubungan tadi sudah, Bu, jadi kemudian terkait tentang bagaimana kami juga yakin bahwa BLK ini harus menjadi suatu solusi kita untuk ke depan, Bu, saya setuju. Dan PR-nya, ya tadi, Bu, ya, efektivitas kita terus *improve* sampai indikatornya penempatan, seperti kata Pak Zainul tadi. Kemudian yang kedua *scaling*-nya kita tingkatkan, dan pemerataan, Bu, pemerataan kita masih PR. Ini sekaligus menjawab yang halaman 8, *slide* halaman 8, nanti kami perbaiki, Bu, ya. Jadi, maksudnya *slide* halaman 8 itu ada yang belum punya UPTP dan belum punya Satpel dan pra-Satpel. Jadi, ada satu lagi, pra-Satpel-nya enggak ada. Kalau tiga-tiganya itu tidak ada memang di enam provinsi, ya, enam provinsi yang tadi, ya. Dan nanti kami cek terkait dengan LISTRAF itu sudah menjawab itu atau belum nanti, Bu, ya. Terima kasih, Bu Meli.

Pak Nurhadi, tadi sudah. Siap, Pak, kalau gebrakan dari Pak Wamen, mah, selalu gebrakan, Pak Nurhadi, ya. Bu Netty, terima kasih, tadi juga konten generasi muda ini kami terus mencari, Bu. Kita juga membayangkan, ini masih mendesain,

MoU kami dengan Kementerian Dikdasmen ini termasuk salah satunya adalah menyelaraskan antara SMK dengan BLK. Tapi, desainnya belum, belum, apa, masih kita bahas, nanti kami juga bisa laporkan kepada Bapak dan Ibu di sini.

Pak Sahidin, ada program, Pak, itu adalah kewirausahaan. Jadi, kita ada tenaga kerja mandiri, di situ ada pelatihan-pelatihan kewirausahaan. Kemudian kami juga sudah ada MoU dengan Kementerian UMKM, Pak. Jadi, untuk melakukan pelatihan wirausaha, dan masukan dari Bapak nanti kita jadikan sebagai catatan untuk kita bisa, ya, membuat dia lebih, lebih masif, ya, karena kebutuhan wirausaha saya setuju, dengan PHK, dengan kemudian lapangan kerja, kondisi global seperti sekarang, wirausaha itu menjadi suatu solusi.

Bu Teti, sepertinya ke BNSP, Bu, ya. Kemudian, Bu Indah. Jadi, ini begini, Bu, saya setuju yang sedang berkembang sekarang ini dengan Pak Sihar juga disebut dengan rekognisi, Pak, ya. Rekognisi itu RPL, ya, Rekognisi Pembelajaran Lampau. Jadi, ada sebuah mekanisme sebenarnya kalau mereka sudah *expert*, jadi mereka enggak perlu diuji lagi, cukup direkognisi.

Tapi, rasanya kita belum, ya, Pak Kepala, Pak Ketua, belum, ya?

Nanti kita bisa, ah sudah? Sudah, ya? Portofolio sudah? Sudah, Pak, nanti tinggal dimasifkan mungkin, ya, rekognisi. Iya, basisnya portofolio, benar, Bu.

Baik rasanya itu, Pak Asep, mungkin nanti lebih detail kami perlu informasinya, Pak, ya, seperti apa. Bu Rahmawati, sinergi BLK dan industri ini memang menarik ini, Bu, saya juga tadi terbayang kita perlu *review* lagi skema pelatihan yang ada, begitu, ya, kita undang dari industri untuk melihat relevansinya. Tapi, yang kami lakukan sekarang adalah mendekatkan BLK dengan kawasan industri. Jadi, beberapa, kami sudah punya beberapa forum, kita, bertemu dengan Pimpinan-Pimpinan kawasan industri dan desain yang kami tawarkan itu adalah di setiap kawasan industri itu ada BLK sektornya. Di situlah kemudian pelatihan-pelatihan *real* untuk menyuplai kebutuhan industri. Salah satu contoh yang bagus itu Batam, Bu, itu sudah cukup bagus, begitu, ya, di daerah Batam. Kemudian mereka dekat dengan BLK dan Politeknik, itu contoh yang bagus.

Itu, dari Bu Putih Sari, Pak Charles, tadi terima kasih. Ini jadi revitalisasi, isu klasik, dan *skilling*, *upskilling*, iya, ini adalah satu tupoksi kami yang kami harus terus melakukan perbaikan dan kami yakin juga nanti dukungan dari Komisi IX, Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota, nanti terkait bagaimana kita bisa mewujudkan harapan-harapan kita tadi ke depan.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (CHARLES HONORIS/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Baik, terima kasih, Pak Menteri.

Kita lanjut, Pak Ketua BNSP bisa memberikan tanggapan terhadap pendalaman Anggota. Silakan, Pak.

KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI (SYAMSI HARI, S.E., M.M.):

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Dari Pak Zainul, tadi ada beberapa hal, Pak, tentang BLK, kami 426 skema sertifikasi yang digunakan di 21 LSP BPVP Naker ini sudah ada, Pak, sejak tahun 2023, dan sekarang sedang pengembangan, Bapak, karena ini untuk mengantisipasi kepada industri tadi.

Pak Muhamad Haris yang terhormat, kami dari melihat, kok, zaman sekarang IT-nya buruk, begitu, ya, Pak, ya, sementara sudah zamannya IT, nih, seperti ini. Ya memang, Pak, kami di *slide* tadi nomor 10, baru kita kembangkan sekali, Pak, ini, di sini ada 15 aplikasi untuk pelayanan. Memang target pasti pelayanan, Pak, kami ini, Pak. Dan telah diterapkan juga nanti, eh maaf, e-sertifikat, Pak, karena tahun kemarin itu satu juta tiga ratus sekian manual sertifikat, nanti kita akan kembangkan e-sertifikat *insya Allah* dengan Kemnaker, Pak, tahun ini, Pak, begitu, ya. Itu menjadi basis kita, Pak.

Adapun di LSP sendiri mungkin beragam, Bapak dan Ibu, kondisinya untuk pengembangan IT, tidak sama semua ada LSP yang memang besar, yang sedang, dan kecil. Jadi, memang beda-beda, Pak. Dan ini dari LSP sendiri mempengaruhi dari IT tersebut, Pak, sehingga *gap*-nya masih ada dan perlu kita dorong terus. Dan tentunya, Pak, sertifikasi jarak jauh, ini kita kembangkan, Pak, dan sudah ada, belum semua, tapi tidak bisa semua disertifikasi jarak jauh, Pak. Begitu ujiannya kelas tidak mungkin pakai jarak jauh, Pak, karena itu harus praktik. Tapi ada yang begitu, basisnya IT, ya, basisnya manajemen, itu bisa menggunakan jarak jauh.

Dan kenapa juga di sini ada besar sekali jeda 0,79% ini, ini tugas besar, Bapak, Pak Menteri, ya, Bapak/Ibu semuanya, dukungan dari Bapak dan Ibu, karena kami 21 sektor, Bapak dan Ibu, jadi kalau Komisi I sampai XIV sekarang, ya? XIII, ya? Itu ada semua kami, Pak. Di keamanan pertahanan kami ada, di

kehutanan lingkungan hidup kami ada, pertanian, itu kami ada semua, Pak, dan nanti silakan Pak Menteri, Pak Pimpinan, kalau memang komisi yang di mana kami *welcome* saja, ya. Utamanya kami ingin kompetensi ini cepat, gambaran tadi, jeda tadi. Karena di situ kami lihat juga pada saat penyusunan peraturan, Pak, ini memasukkan *mandatory* dari sertifikasi. Sudah banyak kami *mandatory* dari beberapa K/L, tapi belum semua lini, Pak, ada sekitar 30-an dari K/L dan Badan me-*mandatory*-kan untuk sertifikasi kompetensi ini sehingga posisinya akan merambah terus menaik ke depan.

Juga begini, Bapak dan Ibu, BNSP ini 2005, sementara LPJK sudah dari tahun 19 atau hak yang lainnya, Bapak dan Ibu, sudah duluan ada sertifikasi tersebut, sudah ada undang-undangnya sudah ada. Namun demikian, kami di PP Nomor 10, ya, 10 Tahun 2018 ini, mengamanatkan di dalam ini, Pak, pelaksanaan sistem sertifikasi kompetensi kerja yang selama ini sudah berjalan di Indonesia, yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan atau telah diakui lembaga internasional tetap berlaku, dan disesuaikan dengan sistem sertifikasi kompetensi yang dilakukan oleh BNSP. Ini sambil berjalan, Bapak dan Ibu, ini harmonisasi.

Kemudian dari Ibu Sri, iya, Ibu, di sini kami memang melihat kondisi bahwasanya KADIN, APINDO ini, Ibu, KADIN, APINDO ini, dan asosiasi kami merangkul karena juga tanpa mereka, kami juga tidak bisa mengembangkan juga kondisi sertifikasi kompetensi ini. Beberapa dari *stakeholder* kita juga dari Kemenko untuk mendiseminasikan juga bahwasanya di K/L-K/Lnya kita hadir di situ.

Pak Nurhadi yang tadi, pelajar, ya, apa, pekerja seni, ya, Pak, ya, tidak harus *level high*, betul, Pak, kami tidak hanya di *level high*, tapi kita pekerja di bawah seni itu ada LSP musik, Pak, namanya. Kami kemarin BNSP menyertifikasi Anang, Pak Anang, Yovie, Pak Yovie Nuno, ya, Siti Badriah, ya, Addie M.S. Ini sudah, Pak. Kemudian di level ini kenapa mereka juga ternyata, kok, perlu disertifikasi? Ini pertanyaannya sama dengan Bapak, ya, sudah mahir, sudah apa, sudah. Ada sistem uji kita pakai portofolio, Pak. Pakai portofolio ada, ya. Sudah mahir pun masih sertifikasi, kenapa, kan, begitu, ya, Pak, ternyata memang teman-teman juga yang ingin sertifikasi menyatakan bahwasanya perkembangan zaman dibutuhkan, perubahan zaman dibutuhkan, seperti hal di luar negeri nanti dia ditanya, Pak. Nah, jadi teman-teman juga mengetahui itu.

Dan kedua ini adalah kami juga bersepakat dengan teman-teman yang sudah profesional sekali, yang sudah enggak perlu sebenarnya sertifikasi, tapi butuh kertas dan sertifikasi pengakuan itu adalah untuk adik-adik, Pak, adik-adik yang tadi notabene jumlahnya kalau melihat dari SMP, SD itu di angka hampir 150 juta ini di kemudian hari, maka Indonesia Emas ini 10 tahun kemudian ini mereka

akan hadir di sini. Untuk adik-adik, Pak, ternyata. Jadi, mereka juga para seni, memanfaatkan itu untuk ke bawah.

Kemudian lanjut dari Bu Netty, dari PMI, ya, Bu, ya, PMI yang ada di luar negeri yang kita ini, Jepang dengan Korea, Bapak/Ibu, kemarin. Jepang dengan Korea ini, kami melihatnya di sini ada suatu ketentuan di Korea yang B2B sudah *mandatory*, yang G2G belum. Nah, sehingga kenapa dengan hak tersebut kami hadirkan di sini dengan KP2MI selalu koordinasi, Bapak, dan juga di sini ada penjaminan mutu, kenapa dengan tidak sesuai prosedur. Memang dari 2.400 itu LSP, apa yang perlu kita perbaiki, ini kita melakukan suatu *surveillance*, Bapak/Ibu, baik itu *online* maupun *offline*, ya. Dan ada saja dan sudah kita lakukan tindakan, Bapak dan Ibu, pembekuan dan pencabutan di tahun ini. Sebenarnya kita enggak senang sekali untuk hal itu, tapi apa yang harus kita lakukan adalah itu untuk menjamin mutu kami.

Dari Bu Teti, bagaimana dengan tadi juga Jepang-Korea, Bu, ditanyakan, ya, Bu, ya, yang imigran, ya. Ini tadi, Bu, revisi, Bu, misalkan seperti itu di peraturan, ya, menguatkan kembali tentang sertifikasi karena beberapa di *mandatory* peraturan itu dimasukkan sertifikasi di BPJPH. Contoh, kelembagaannya dari BPJPH, tapi untuk orang yang melaksanakannya dari BNSP sehingga ini terkait-terkait, Bapak dan Ibu, sertifikasi ini menjabat di luar negeri apa saja, ada, Bapak/Ibu, produk halal, contohnya produk halal, yang BPJPH ini halal masuk ke Indonesia. Sertifikasi dari akreditasi dari lembaganya BPJPH, tapi untuk orangnya BNSP sehingga kita ada menyertifikasi warga negara asing, Korea Selatan, Taiwan, Thailand, Cina yang mengekspor, kalau kita mengimpor, yang mengekspor barang-barang makanan, kosmetik, buah-buahan ke sini harus ada yang memvalidasi kehalalan, Pak/Ibu, diambil sama mereka. Di sana kita ketemu dengan MUI-nya, MUI-nya negara mereka, Bapak dan Ibu.

Juga di OJK, seperti contoh, pada saat mau menjadi Direksi dan Komisaris di Indonesia di lembaga pembiayaan, itu mewajibkan sertifikasi sehingga kita menyertifikasi warga negara Tokyo, apa, Jepang, Bapak dan Ibu, di Tokyo kemarin. Ini mereka mengikuti aturan kita. Jadi, sebagai *international* atau barometer, ya, kita harapkan halal itu internasional kita, lah, Pak, kita menginternasionalkan mereka. Ini menjadi bagian kekuatan kita, Pak.

Dan lagi Ibu Indah, ya, tadi ada pertanyaan lagi antar negara, Bu, itu seperti itu untuk *outcome* terverifikasi dan jaminannya, Bu, ya. Dan portofolio tadi, Pak, di sini di balai BPVP dan balai besar ini sudah ada LSP-nya, Bapak dan Ibu, semuanya. Di balai itu mempunyai regional, tentunya pastinya semua UPTD-nya itu jaringannya ke UPTP tadi, skema, asesor dan ujinya itu ke sana, jadi sudah ada jaringannya di sana untuk LSP, Bu.

Untuk selanjutnya, mungkin dari kita sementara itu, dari BNSP, Bapak dan Ibu. Terima kasih.

KETUA RAPAT (CHARLES HONORIS/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Baik. Terima kasih, Pak Ketua BNSP.

F-P. GERINDRA (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX):

Saya mau menambah sedikit, Pak Ketua. Izin.

KETUA RAPAT (CHARLES HONORIS/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Silakan, Bu Putih.

F-P. GERINDRA (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX):

Yang pertama terkait dengan, ini karena tadi Pak Edy Wuryanto waktu rapat kita sebelumnya di rapat agenda kita yang awal tadi pagi, menyebutkan bahwa tenaga kesehatan, tenaga medis, ini sering tidak dianggap bagian dari tenaga kerja, Pak Menteri, ya. Karena ada beberapa mereka yang, ya, sejarah kesejahteraan maupun juga perlindungan sosial ketenagakerjaannya banyak yang diabaikan oleh tempat mereka bekerja.

Nah, termasuk juga, saya kira terkait juga dengan sertifikasi, lah, ini pelatihan, lah, ya, pelatihan itu, apa namanya, kan mereka diakui sebagai tenaga kesehatan ataupun juga tenaga medis sesuai profesinya, ya, di lembaga, biasanya itu ada SKP, ya, Sistem Kredit Profesi, mereka harus kumpulkan melalui seminar-seminar, begitu, ya, pelatihan-pelatihan. Nah itu baru biasanya untuk perpanjangan izin praktik selaku tenaga medis, tenaga kesehatan. Nah, ini saya enggak tahu sinkronisasinya seperti apa selama ini di Kementerian Ketenagakerjaan ataupun mungkin juga dengan BNSP. Karena setahu saya kalau yang disertifikasi kaya K3, Hiperkes, nah itu, kan, mereka juga ikut, tuh, ya. Nah, ini kan diminta kalau, apa namanya, di perusahaan, kalau mereka sebagai tenaga kerja juga. Jadi, saya kira perlu ada sinkronisasi lebih lanjut.

Nah, yang selanjutnya juga, ini ada fenomena juga, saya kira, penambahan gelar nonakademik, ya. Saya kira ini jadi kewenangan siapa, sih, sebenarnya, ya, karena rasanya apakah juga sudah ada aturannya atau belum karena ada banyak, saya kira, lembaga-lembaga sertifikasi keahlian atau pelatihan profesi ini yang membuat gelar-gelar nonakademik, ya, apa namanya, baik yang swasta atau mungkin yang diakui oleh pemerintah yang kadang memang ada yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Ini saya kira saya enggak paham ini pengaturannya seperti apa,

agar ini bisa lebih diperjelas saja, jangan sampai, apa namanya, jadi bias ke depannya, begitu.

Jadi, kadang orang kalau sudah menambahkan gelar di belakang nama, itu dengan gelar yang panjang-panjang, tahunya itu pendidikan formal, kan, begitu, kan, dapat dari, apa namanya, sekolah, begitu. Tapi kebanyakan sekarang ini justru dari, ya tadi, dari yang nonakademik. Saya kira ini perlu perhatian saya.

Terima kasih. Itu saja, Pimpinan.

F-PDI PERJUANGAN (INDAH KURNIAWATI, S.E., M.M.):

Pimpinan.

F-PKS (Dr. H. MUH. HARIS, S.S., M.Si.):

Izin, Pimpinan.

F-PDI PERJUANGAN (INDAH KURNIAWATI, S.E., M.M.):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT (CHARLES HONORIS/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Bu Indah dulu. Nanti setelah itu kita lanjut, ya.

Bu Indah, silakan.

F-PDI PERJUANGAN (INDAH KURNIAWATI, S.E., M.M.):

Terima kasih.

Sebenarnya Pak Syam, Pak Syamsi Hari, ya, Pak, ya, Bapak Syamsi Hari belum menjawab pertanyaan saya, Pak. Tentang *outcome, output* dari yang dilakukan BNSP mengacu kepada MRA itu, Pak, *Mutual Recognition Agreement.* Itu apakah setelah sertifikasi itu, apakah sudah tercapai berapa, bisa diukur enggak hasilnya? Itu tadi saya tanya, enggak harus sekarang enggak apa-apa, nanti bisa dijawab dengan jawaban tertulis, tapi sebenarnya pertanyaan saya lebih daripada *output* dan *outcome* dari BNSP, mengacu kepada *Mutual Recognition Agreement.*

Thank you.

KETUA RAPAT (CHARLES HONORIS/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Ya, silakan, Pak Haris.

F-PKS (Dr. H. MUH. HARIS, S.S., M.Si.):

Pak Menteri.

Sering kali, apa ya, keluaran dari BPVP maupun BLK itu punya *skill*, tapi tidak bisa jalan karena enggak punya *sikil*, begitu. Punya *skill*, enggak bisa jalan, kan, enggak punya *sikil. Sikil* itu modal, Pak, kalau Jawa itu.

Ngoten, Bu Indah, ya?

Sehingga penting barangkali, Pak Menteri, untuk menjalin kerja sama dengan berbagai keuangan perbankan saat pelatihan itu. Sehingga misalnya angkatan 1 di 1 BPVP itu 50 orang, pastikan bahwa *skill* yang dia miliki itu pulang bisa membuka usaha. Karena dia punya *sikil*, punya jaringan dengan lembaga keuangan tadi. Bank ini penting, terutama paling tidak, perbankan-perbankan BUMN itu yang perlu digandeng oleh Pak Menteri.

Matur nuwun, Pimpinan.

KETUA RAPAT (CHARLES HONORIS/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Baik, terima kasih, Pak Haris.

Kita kembalikan, Pak Menteri, ya. Silakan, Pak Menteri, setelah itu Pak Ketua BNSP untuk menanggapi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Prof. YASSIERLI, S.T., M.T., Ph.D.):

Ya, terima kasih.

Jadi, ini tambahan yang tadi, ya, Pak Ketua, ya. Dari Bu Putih tadi sertifikasi tenaga kesehatan, kami akan cek, Bu, koordinasi, memang, ya, Kementerian Kesehatan juga mitra di sini, ya. Yang pernah saya dengar memang ada beberapa Kementerian Teknis, Pak Ketua BNSP, mereka punya, apa ya, punya lembaga tersendiri yang itu lebih diakui. Ini mungkin kaya kolokium, begitu, mungkin, Bu, ya, tapi nanti kami akan koordinasikan, Bu Putih. Terima kasih.

Aturan gelar nonakademik kami juga akan lihat, belum bisa kami jawab sekarang, nanti kita lihat, ini tapi ini benar, ya, nanti dia punya sertifikat 20 nanti panjang itu namanya, semuanya dicantumkan. Terima kasih, Bu Putih.

Mutual Recognition Agreement, nanti BNSP jadi PR kami. *Skill* dan *reskill* juga, nanti kita ada beberapa program pelatihan kewirausahaan, itu sebenarnya sudah ada skema KUR-nya, Pak Haris, ya, jadi kita sudah buka, sih, sebenarnya. Tapi yang PBL memang belum, ya, tapi nanti kami, kami akan, apa, kami akan catat ini.

Terima kasih. Terima kasih, Pak Ketua, terima kasih Bapak/Ibu semua.

KETUA RAPAT (CHARLES HONORIS/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Dari Pak Ketua BNSP, ada yang mau ditanggapi, apa cukup? Silakan.

Menyusul enggak apa-apa, Pak, di jawaban tertulis, ya.

Baik, Bapak/Ibu, sudah dijawab oleh Pak Menteri Ketenagakerjaan dan Pak Ketua BNSP, kita langsung lanjut ke draf kesimpulan, ya.

Mohon ditayangkan.

Draf kesimpulan Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Ketenagakerjaan, saya ulang, nih, biar enggak salah. Menteri Ketenagakerjaan RI dan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Rabu, 2 Juli 2025.

1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan transformasi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) di seluruh provinsi melalui langkah-langkah sebagai berikut:
   a. Penguatan Unit Pelaksana Teknis Pusat Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (UPTP-BPVP) melalui pendirian balai baru di kawasan strategis nasional dan perlu dirancang secara responsif untuk kebutuhan spesifik daerah, terutama di 6 provinsi tanpa BLK Pusat.
   b. Melakukan kolaborasi dengan industri, perguruan tinggi negeri dan swasta, serta lembaga riset untuk *link and match* memasuki dunia kerja.
   c. Digitalisasi pelatihan melalui Siap Kerja dan perluasan Kios 3 *in* 1, terutama dalam penyiapan tenaga kerja kompeten, mendukung pendirian 80.000 koperasi.
   d. Pemberdayaan BLK komunitas menjadi inkubator wirausaha.
   e. Mendorong percepatan penambahan infrastruktur,

Mohon maaf.

Mendorong percepatan penambahan instruktur, penguatan pemagangan, dan pelatihan berbasis proyek nasional (*project based learning*) yang adaptif terhadap *skill* masa depan, *future skill* (AI, IOT, *digital manufacturing*) dan didukung kolaborasi dengan dunia usaha, dunia pendidikan, dan lembaga riset.

Saya akan menanyakan dulu kepada Bapak/Ibu Anggota terkait dengan poin 1, apakah ada yang ingin ditambahkan, dikoreksi atau bisa disepakati. Silakan.

Cukup? Ya, saya ketuk, ya.

(RAPAT: SETUJU)

Baik, untuk poin 2.

2. Komisi IX DPR RI mendesak Kemnaker RI dan,

Ini enggak boleh disingkat, nih, dipanjangkan nanti.

Mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk berkolaborasi dengan. Mohon maaf.

Mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI dan BNSP berkolaborasi melakukan audit efektivitas pelatihan dan sertifikasi dengan serapan tenaga kerja.

Komisi IX DPR RI, tambahkan, DPR RI juga meminta evaluasi berkala kebutuhan SKKNI.

Oh, sudah diganti.

Meminta evaluasi berkala, coba. Meminta evaluasi berkala kebutuhan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) disesuaikan dengan kebutuhan penyerapan tenaga kerja dalam iklim investasi nasional.

Ya, saya berikan kesempatan, Bapak/Ibu Anggota, apakah ada yang ingin ditambahkan atau direvisi?

Cukup, ya? Baik.

(RAPAT: SETUJU)

Baik, poin 3.

3. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI melakukan harmonisasi, mendukung penguatan peran Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dalam percepatan sertifikasi di Balai Latihan Kerja (BLK) dengan langkah-langkah sebagai berikut:
   a. Percepatan rekomendasi pembuatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dari BLK milik pemerintah atau lembaga pelatihan swasta untuk mendukung percepatan sertifikasi pada peserta pelatihan.
   b. Mendorong pembuatan regulasi untuk memperkuat komitmen pengakuan sertifikasi dan pelatihan sebagai prasyarat kerja di semua sektor usaha.
   c. Perluasan akses, integrasi, digitalisasi layanan pelatihan, dan sertifikasi secara nasional.
   d. BNSP perlu terus menjaga independensi, meningkatkan transparansi, serta memperkuat kolaborasi internasional dalam menghadapi mobilitas tenaga kerja.

Ya, poin 3, apakah ada yang ingin ditambahkan, Bapak/Ibu?

Cukup, ya?

(RAPAT: SETUJU)

4. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI berkoordinasi dengan BNSP dan lintas kementerian/lembaga guna mempercepat sertifikasi kompetensi tenaga kerja yang diakui secara internasional sehingga sertifikat benar-benar menjadi prasyarat utama bagi pencari kerja muda dan pekerja migran dalam mengakses pasar kerja global.

Cukup, ya, Bapak/Ibu?

Apa ini sertifikat atau sertifikasi yang benar? Sertifikasi, ya, jadi kita, saya bacakan kembali.

Sehingga sertifikasi benar-benar menjadi prasyarat utama bagi pencari kerja muda dan pekerja migran dalam mengakses pasar kerja global.

Bapak/Ibu, cukup? Apa ada yang ingin ditambahkan?

Cukup, ya.

(RAPAT: SETUJU)

Baik, saya serahkan ke Pak Menteri Ketenagakerjaan, dari daftar kesimpulan yang sudah kami tampilkan, apakah ada yang ingin ditambahkan atau direvisi? Silakan.

MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Prof. YASSIERLI, S.T., M.T., Ph.D.):

Iya, terima kasih, Pak Ketua. Ditambahkan enggak ada, direvisi ada, Pak Ketua.

1a, penguatan Unit Pelaksana Teknis, ya, UPTP, kami mengusulkan melalui, enggak tadi sudah biar saja dulu, melalui pendirian balai barunya, mohon izin kami usul untuk dihapus saja, ya. Karena itu, kan, ada beberapa yang kami transformasi dari yang, apa, dari daerah. Kan *how*-nya, kan, mungkin bisa macam-macam strateginya, tadi Pak Safei juga menyampaikan hal yang sama, ya. Jadi, esensinya, kan, sebenarnya adalah satu UPTP untuk satu provinsi, itu, kan, sebenarnya.

KETUA RAPAT (CHARLES HONORIS/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Oke, paham. Ya, *oke-oke.*

Bisa disetujui, ya, permintaan Pak Menteri, ya, dihapus saja.

Baik, yang lain, Pak?

MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Prof. YASSIERLI, S.T., M.T., Ph.D.):

Oke. Penguatan Unit Pelaksana, UPT itu Unit Pelaksana Teknis, bukan pelaksanaan. Dalam kurung UPT, ya, Unit Pelaksana Teknis (UPT), UPTP, oh *sorry*, Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP).

Sudah-sudah, *oke* sudah, siap, terima kasih.

Yang nomor 2 *request* kami.

KETUA RAPAT (CHARLES HONORIS/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Coba, diturunkan ke nomor 2.

MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Prof. YASSIERLI, S.T., M.T., Ph.D.):

Nomor, enggak, nomor d-nya, Pak, Pak Ketua.

Pemberdayaan BLK Komunitas menjadi Inkubator Wilayah Usaha. Kami mohon izin, tadi, kan, kita belum banyak bicara, belum malah, BLK Komunitas, ya, potretnya seperti apa, jadi kami mohon izin ini mungkin bisa kita simpan dulu mungkin, untuk ini.

KETUA RAPAT (CHARLES HONORIS/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Ya sudah ini hapus saja.

Jadi, poin e menjadi poin d, ya?

MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Prof. YASSIERLI, S.T., M.T., Ph.D.):

Iya. *Oke.*

Oh iya, ini nomor a, mohon izin sedikit, kata-katanya juga agak rancu. Terutama di 6 provinsi yang belum memiliki, harusnya, bukan tanpa, ya. Yang belum memiliki BLK Pusat.

KETUA RAPAT (CHARLES HONORIS/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Yang belum memiliki Balai Latihan Kerja.

MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Prof. YASSIERLI, S.T., M.T., Ph.D.):

Baik, terima kasih, Pak Ketua.

Yang lain, nomor satu, *oke,* ya. Nomor dua, nomor dua itu mungkin kalau kami usul jangan audit, Pak Ketua, mungkin asesmen, ya. Kalau audit kesannya lebih prosedural, ya. Asesmen saja bahasa Indonesia-nya, asesmen sudah jadi bahasa Indonesia.

KETUA RAPAT (CHARLES HONORIS/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Asesmen, s-nya satu, tanpa t.

MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Prof. YASSIERLI, S.T., M.T., Ph.D.):

Mohon izin juga, Kementerian Ketenagakerjaan RI, untuk, bukan berkolaborasi, ya, berkoordinasi. Bukan berkolaborasi. Yang nomor 2 masih.

Oke. Nomor 3, Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan melakukan penguatan, enggak usah, harmonisasi, mohon izin, harmonisasi pendukung.

Ya, biar lebih efektif saja, penguatan peran. Ya, *oke.*

Yang lain *oke. Oke*, sampai d, sip.

Nomor 4, *oke.* Pak Wamen? Prof?

Baik, terima kasih, Pak Ketua, dari kami cukup.

KETUA RAPAT (CHARLES HONORIS/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Ya, baik.

Ini BNSP perlu kita mintakan tanggapan enggak? Kan bukan mitra kita.

Ya, Pak Ketua BNSP, silakan dilihat poin 2, 3, dan 4. Karena menyebut BNSP di sini, kita minta persetujuannya untuk bersama-sama jadikan ini kesimpulan.

Ya, silakan dinaikkan dulu, ada 2, ya. Dua, ya.

KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI (SYAMSI HARI, S.E., M.M.):

Oke. Baik, izin, Bapak Ketua.

KETUA RAPAT (CHARLES HONORIS/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Oke, ya. Poin 3.

KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI (SYAMSI HARI, S.E., M.M.):

3a, Pak.

KETUA RAPAT (CHARLES HONORIS/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

3a.

KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI (SYAMSI HARI, S.E., M.M.):

Percepatan lisensi.

KETUA RAPAT (CHARLES HONORIS/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Pak Menteri, ada keberatan enggak, dengan perubahan ini?

Kalau ditambahkan bagaimana? Rekomendasi dan lisensi, atau lisensi.

KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI (SYAMSI HARI, S.E., M.M.):

Rekomendasi saja, Pak.

KETUA RAPAT (CHARLES HONORIS/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Rekomendasi saja. *Oke,* baik.

Yang lain?

KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI (SYAMSI HARI, S.E., M.M.):

Rekomendasi yang 4, Pak Ketua, izin.

KETUA RAPAT (CHARLES HONORIS/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

4, coba turun lagi.

Yang nomor 4 sebetulnya lebih kepada Kementerian Ketenagakerjaan, ya, kan?

KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI (SYAMSI HARI, S.E., M.M.):

Yang nomor 4 Bapak, sehingga sertifikat kompetensi, sertifikasi.

KETUA RAPAT (CHARLES HONORIS/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Jadi, sertifikat kompetensi atau sertifikasi, nih, yang benar?

Sertifikat kompetensi, ya. *Oke*.

Bapak/Ibu Anggota.

Tidak ada yang keberatan, ya, dengan perubahan ini? Pak Menteri *oke*? Sertifikat kompetensi *oke,* Pak?

Baik. Cukup, ya, saya ketuk.

(RAPAT: SETUJU)

Dengan demikian, draf kesimpulan menjadi kesimpulan Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Ketenagakerjaan RI dan Ketua Badan Nasional Sertifikat Profesi, tertanggal Rabu, 2 Juli 2025.

Baik, Bapak/Ibu, kita sudah selesai dengan kesimpulan rapat, dengan demikian rapat juga sudah selesai. Dan sebelum kami akhiri, kami berikan kesempatan dulu kepada Pak Menteri untuk menyampaikan satu dua patah kata sebagai penutup.

Silakan.

MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Prof. YASSIERLI, S.T., M.T., Ph.D.):

Terima kasih, Pak Ketua, Bapak dan Ibu Pimpinan Komisi IX, Bapak dan Ibu Anggota Komisi IX. Kami mengucapkan terima kasih atas semua masukan, diskusi kita pada sore hari ini. Kami juga ingin ada *request* sebenarnya, ketika nanti kita berbicara percepatan optimalisasi, kami juga butuh dukungan terkait tentang, ya, anggaran, ya. Karena memang kita bicara nanti dukungan infrastruktur, instruktur, percepatan jumlah, itu nanti terkait dengan anggaran kami.

Terima kasih banyak.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (CHARLES HONORIS/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Terima kasih.

Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.

(BERDOA)

Selesai.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.57 WIB)

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT

Ttd

Ida Nuryati, S.Sos., M.A.
NIP.197604011998032002